



KEMENTERIAN  
KELAUTAN DAN  
PERIKANAN

# Laporan Kinerja Tahunan

Inspektorat Jenderal KKP

Tahun  
2024



**PERNYATAAN TELAH DIREVIU  
INSPEKTORAT JENDERAL  
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
TAHUN ANGGARAN 2024**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk Tahun Anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 7 Februari 2025  
Inspektur



Ady Soeseno  
NRP. 70010201

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja (LKj) Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Tahun 2024 dapat diselesaikan. Laporan Kinerja Itjen KKP Tahun 2024 merupakan pemenuhan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Laporan ini juga merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kinerja Inspektorat Jenderal KKP dalam melaksanakan program dan kegiatan pengawasan intern lingkup KKP.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan hasil pengukuran kinerja Itjen periode tahun 2024 guna memberikan informasi mengenai pencapaian kinerja secara terukur kepada pimpinan selaku pemberi mandat atas kinerja yang harus dicapai. Informasi yang disajikan dalam laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi perbaikan pelaksanaan kegiatan serta proses pencapaian kinerja ke depan, sehingga diharapkan seluruh target kinerja yang dimandatkan pada tahun selanjutnya dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil evaluasi, kinerja Itjen tahun 2024 masuk dalam kriteria istimewa, hal ini ditunjukkan dari skor kinerja Itjen sampai dengan Triwulan IV yang mencapai 110,14. Nilai tersebut menggambarkan kondisi umum atas pencapaian sasaran kinerja yang ditetapkan sebagai hasil (*outcome*) dari pelaksanaan tugas dan fungsi Itjen tahun 2024. Beberapa hasil penting yang dapat dicapai Itjen dan berkontribusi terhadap perbaikan tata kelola KKP diantaranya: 1) Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan KKP dengan capaian 0,09% dari target  $\leq 0,5\%$ ; 2) Nilai Maturitas SPIP KKP dengan capaian 3,68 dari target 3,3 atau telah memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP Terdefinisi pada Level 3; 3) Unit Kerja KKP Berpredikat Menuju WBK (akumulasi) dengan capaian sebesar 109 unit kerja dari target 105 unit kerja; 4) Nilai Penilaian Mandiri SAKIP KKP dengan capaian 86,11 dari target 84 atau dengan predikat memuaskan (A); 5) Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup KKP dengan capaian 94,02% dari target sebesar 80%; dan 6) Tingkat Kapabilitas Itjen KKP dengan capaian berada pada **“Level 3”** dengan skor 3,70 dan karakteristik **“delivered”** dari target nilai sebesar 3,5. Selain memberikan kontribusi perbaikan terhadap kinerja kementerian, pelaksanaan program dan kegiatan Itjen tahun 2024 juga telah menghasilkan berbagai perbaikan internal yang

meliputi perbaikan kapabilitas, akuntabilitas, profesionalitas, dan tingkat maturitas pengendalian internal Itjen. Penjelasan lebih rinci mengenai pencapaian kinerja Itjen tahun 2024 akan disajikan pada bagian pembahasan dalam laporan ini.

Secara umum, kinerja pengawasan intern KKP yang dilaksanakan oleh Itjen cukup memuaskan. Namun demikian, Itjen akan terus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsinya agar hal-hal yang masih kurang atau belum optimal dapat ditingkatkan. Melalui manajemen kinerja yang sistematis dan terstruktur, evaluasi kinerja Itjen dilaksanakan secara terukur dan berkala guna memastikan pelaksanaan pengawasan intern itjen berada di jalur yang benar dan dapat mencapai sasaran yang diharapkan. Langkah perbaikan pengawasan intern ke depan salah satunya dilaksanakan dengan meningkatkan peran dan mutu Itjen dalam hal penjaminan kualitas (*Quality Assurance*) dan pemberian advis (*Advisory Services*) pada pelaksanaan program dan kegiatan mitra kerja.

Selanjutnya, kami sampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh *stakeholders* atas kerja sama dan dukungan yang diberikan selama pelaksanaan tugas dan fungsi kami. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian laporan kinerja ini. Kami sadari, apa yang telah kami kerjakan belumlah sempurna, pepatah mengatakan “tak ada gading yang tak retak”. Untuk itu, kami juga menyampaikan permohonan maaf atas segala kesalahan dan kekurangan yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan tugas kami. Masukan dan kritik yang membangun sangat kami harapkan untuk meningkatkan kualitas pengawasan intern yang menjadi mandat kami. Akhir kata, semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Jakarta, 7 Februari 2025  
Inspektur Jenderal,



Tormanda Syaitullah

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Sebagai Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP), Itjen KKP menjalankan mandat untuk melaksanakan pengawasan intern yang dapat memberikan nilai tambah terhadap pencapaian tujuan kementerian. Melalui pelaksanaan tugas dan fungsinya, Itjen berupaya untuk memberikan keyakinan kepada pimpinan kementerian bahwa penyelenggaraan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan telah berjalan secara efektif, efisien, andal, dan senantiasa sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Agar dapat berkontribusi secara efektif dalam memberikan keyakinan atas pencapaian tujuan KKP, pengawasan intern dilaksanakan dengan cara menggunakan pendekatan yang sistematis dan terukur dengan mengacu kepada standar pengawasan yang berlaku. Tidak hanya itu, Itjen juga menerapkan praktik-praktik terbaik yang berkembang seiring dengan pembelajaran dari hasil evaluasi internal maupun dari organisasi lain (eksternal). Mengingat keterbatasan sumber daya pengawasan yang ada, Itjen akan memfokuskan pengawasan pada hal-hal yang signifikan dan berkaitan erat dengan pencapaian tujuan organisasi. Dalam hal ini, pengawasan intern berbasis risiko merupakan pendekatan terbaik yang dapat digunakan untuk menghadapi keterbatasan dan tantangan tersebut. Untuk itu, dalam melaksanakan pengawasan intern, Itjen mengedepankan pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi yang memiliki risiko tinggi dan menjadi perhatian publik dan/atau pimpinan KKP.

Dalam rangka pencapaian tujuan, program yang ditetapkan pada Rencana Kinerja dan Anggaran Itjen tahun 2024 adalah Program Dukungan Manajemen yang dilaksanakan melalui kegiatan pengawasan intern. Keberhasilan Program ini diukur melalui pencapaian 2 Sasaran Program dengan 19 Indikator Kinerja yang ditetapkan dalam dokumen revisi Perjanjian Kinerja pada bulan Oktober Tahun 2024 terkait perubahan indikator kinerja semula Nilai Indikator Kinerja Anggaran (NKA) Itjen KKP menjadi indikator kinerja Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Itjen KKP.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2024, seluruh Indikator Kinerja telah tercapai melebihi dari target yang ditetapkan dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) pada aplikasi pengelolaan kinerja mencapai **110,14 (kategori istimewa)**. Capaian kinerja Itjen yang diukur pada Tahun 2024 diantaranya: 1) Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan KKP dengan capaian 0,09% dari target  $\leq 0,5\%$ ; 2) Nilai Maturitas SPIP KKP dengan capaian 3,68 dari target 3,3 atau telah memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Level 3; 3) Unit Kerja KKP Berpredikat Menuju WBK (akumulasi) dengan capaian sebesar 109 unit kerja dari target 105 unit kerja; 4) Nilai Penilaian Mandiri SAKIP KKP dengan capaian 86,11 dari target 84 atau dengan predikat

memuaskan (A); 5) Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup KKP dengan capaian 94,02% dari target sebesar 80%; dan 6) Tingkat Kapabilitas Itjen KKP dengan capaian berada pada **“Level 3”** dengan skor 3,70 dan karakteristik **“delivered”** dari target nilai sebesar 3,5. Pencapaian yang baik tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya kualitas pengendalian atas perkembangan pelaksanaan kegiatan dan capaian kinerja yang dilaksanakan secara periodik. Secara rinci capaian kinerja Itjen Tahun 2024 tersaji pada tabel berikut.

Tabel Capaian Kinerja Itjen KKP Tahun 2024

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi (%)	Capaian (%)	Nilai di Aplikasi (%)	
Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah Lingkup KKP	1	Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan KKP (%)	≤ 0,5	0,09	181,07	120
	2	Nilai Maturitas SPIP KKP (Nilai)	3,3	3,68	111,52	111,52
	3	Unit Kerja KKP Berpredikat Menuju WBK (unit kerja)	105	109	103,81	103,81
	4	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP KKP (Nilai)	84	86,11	102,51	102,51
	5	Nilai Survei Integritas KKP (Nilai)	78	80,31	102,96	102,96
	6	Tingkat Efektivitas Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis lingkup KKP (%)	82	88,61	108,06	108,06
	7	Tingkat Efektifitas Pengawasan Pengelolaan BMN Lingkup KKP (%)	82	94,39	115,11	115,11
	8	Tingkat Efektifitas Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup KKP (%)	82	90,93	110,89	110,89
	9	Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Itjen (%)	80	94,02	115,11	115,11
Tata Kelola Pengawasan Intern yang Akuntabel dan Efektif	10	Tingkat Kapabilitas Itjen KKP (Nilai)	3,5	3,70	105,71	105,71
	11	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Itjen KKP (Indeks)	85	90,82	106,85	106,85
	12	Unit Kerja Itjen yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)	94	130,56	138,89	120
	13	Persentase Implementasi Sistem Informasi Pengawasan Lingkup Itjen KKP (%)	88	100	113,64	113,64
	14	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Itjen KKP (Nilai)	93,76	98,34	104,88	104,88
	15	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Itjen KKP (Nilai)	81	90,61	111,86	111,86
	16	Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Lingkup KKP (rekomendasi)	18	21	116,67	116,67
	17	Persentase Pelaksanaan Penugasan dan Pelaporan Pengawasan yang Memenuhi Standard Mutu Pengawasan Lingkup Itjen (%)	89	98,50	110,67	110,67
	18	Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaksanaan PKPT Lingkup Itjen KKP (%)	80	99,34	124,17	120
	19	Indeks Persepsi Pegawai KKP Terhadap Kinerja Pengawasan Itjen (Indeks)	4,16	4,37	105,05	105,05

Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 dilaksanakan dengan menggunakan sumber daya anggaran (Pagu Awal) sebesar Rp87.254.343.000,00 dan dengan adanya pergeseran anggaran dalam rangka pemenuhan belanja pegawai KKP Tahun 2024 sebesar Rp464.432.000,00, sehingga alokasi anggaran (Pagu Revisi) Itjen KKP menjadi sebesar Rp86.789.911.000,00. Realisasi anggaran Itjen berdasarkan aplikasi OMSPAN per 31 Desember 2024 sebesar Rp84,427,522,394,00 atau 97.28%, dari pagu revisi Rp86,789,911,000,00 (termasuk anggaran blokir sebesar Rp2.293.710.000,00) dan mencapai 99,99% dari pagu efektif (di luar blokir) sebesar Rp84.496.201.000,00.

Penggunaan sumber daya anggaran tersebut dapat dinilai cukup efisien karena dengan input anggaran (99,99%) dapat dihasilkan capaian *output* program/kegiatan sebesar 100% (efisiensi 0,01%) dan capaian kinerja rata-rata yang mencapai 110,14% (efisiensi 10,15%). Efisiensi anggaran ini dapat dicapai oleh Itjen sebagai hasil dari optimalisasi hari pengawasan yaitu dengan menggabungkan beberapa subjek pengawasan (yang memungkinkan) dalam satu kali perjalanan dinas. Selain itu, tercapainya efisiensi juga dipengaruhi oleh pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan pengawasan dan penerapan pengawasan berbasis risiko yang memungkinkan pengawasan Itjen lebih tepat sasaran. Pencapaian kinerja program Itjen juga didukung oleh sumber daya manusia dengan jumlah 235 orang yang sebagian besar (> 90%) berpendidikan Diploma III/Sarjana Muda, Diploma IV/S-1, S-2, dan S-3.

Pencapaian kinerja di atas juga merupakan hasil dari berbagai kegiatan pengawasan dan berbagai upaya peningkatan kualitas pengawasan intern yang difokuskan kepada pengawasan akuntabilitas kinerja dan keuangan, penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa, kegiatan strategis dan bantuan pemerintah, pembangunan budaya integritas dan penerapan program anti korupsi, tindak lanjut rekomendasi atas temuan Itjen dan BPK, sistem pengendalian internal, dan kualitas pelayanan publik. Selain itu, kinerja Itjen juga terwujud dari adanya upaya serius organisasi dalam meningkatkan kapabilitas Itjen melalui perbaikan manajemen pengawasan, penguatan manajemen SDM, dan optimalisasi pemanfaatan sistem informasi. Kualitas pengawasan intern lingkup KKP juga akan terus diperkuat dan ditingkatkan dengan bersinergi dan berkoordinasi secara lebih aktif dengan APIP Kementerian/Lembaga lain dan pemerintah daerah dalam rangka mengawal pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan nasional.

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL .....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	x
<b>BAB 1 PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Dasar Hukum.....	1
C. Tugas, Fungsi dan Peran.....	2
D. Struktur Organisasi .....	3
E. Maksud dan Tujuan .....	5
F. Ruang Lingkup.....	5
G. Metodologi.....	5
H. Sistematika Laporan .....	6
<b>BAB 2 PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .....</b>	<b>7</b>
A. Rencana Strategis KKP dan Itjen KKP 2020 – 2024 .....	7
B. Kebijakan Pengawasan. ....	8
C. Rencana Kinerja Tahunan .....	12
D. Program dan Kegiatan Pengawasan .....	13
E. Rencana Aksi Pencapaian Target Indikator Kinerja .....	14
<b>BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>15</b>
A. Pengelolaan Kinerja.....	15
B. Capaian Kinerja .....	15
Sasaran Program ke-1.....	18
Sasaran Program ke-2.....	34
C. Realisasi Rencana Aksi .....	48
D. Analisis Pengelolaan Sumber Daya Anggaran.....	49
<b>BAB 4 PENUTUP .....</b>	<b>56</b>
A. Kesimpulan.....	56
B. Permasalahan .....	58
C. Langkah Perbaikan (Rekomendasi).....	58
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>58</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Penetapan Kinerja Itjen KKP Tahun 2024 (Revisi).....	13
Tabel 2.	Rentang Penilaian Capaian Kinerja.....	15
Tabel 3.	Capaian Kinerja Kinerja Itjen KKP Tahun 2024.....	16
Tabel 4.	Capaian Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan KKP Tahun 2024 dan Perbandingan dengan Capaian Tahun 2023.....	19
Tabel 5.	Perkembangan Realisasi Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan KKP Tahun 2014 – 2024 .....	19
Tabel 6.	Perbandingan Realisasi Nilai Maturitas SPIP KKP Tahun 2020 – 2024 .....	20
Tabel 7.	Perkembangan Realisasi Nilai Maturitas SPIP KKP Tahun 2020 – 2024 .....	20
Tabel 8.	Unit Kerja yang Meraih Predikat Menuju WBK lingkup KKP Tahun 2024 (Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 85 Tahun 2024).....	22
Tabel 9.	Perbandingan Realisasi Unit Kerja KKP Berpredikat Menuju WBK Tahun 2024 dengan Tahun 2023 .....	23
Tabel 10.	Perkembangan Unit Kerja Berpredikat menuju WBK lingkup KKP Tahun 2020 – 2024 .....	23
Tabel 11.	Hasil Evaluasi AKIP Unit Eselon I Lingkup KKP Tahun 2024.....	24
Tabel 12.	Perbandingan Realisasi Nilai Penilaian Mandiri SAKIP KKP Tahun 2024 dengan Tahun 2023 .....	25
Tabel 13.	Perkembangan Nilai Penilaian Mandiri SAKIP KKP Tahun 2020 – 2024 .....	25
Tabel 14.	Perbandingan Realisasi Nilai Survei Integritas KKP Tahun 2024 dengan Tahun 2023 .....	26
Tabel 15.	Perkembangan Realisasi Nilai Survei Integritas KKP Tahun 2020 – 2024 .....	26
Tabel 16.	Hasil Evaluasi Tingkat Efektivitas Pengawasan Kegiatan Prioritas/Strategis (Bantuan Pemerintah) Lingkup KKP Tahun 2024 .....	28
Tabel 17.	Perbandingan Capaian Tingkat Efektifitas Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis Lingkup KKP Tahun 2024 dengan Tahun 2023 .....	28
Tabel 18.	Perkembangan Realisasi Tingkat Efektifitas Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis Lingkup KKP Tahun 2020 – 2024 .....	29
Tabel 19.	Realisasi Tingkat Efektifitas Pengawasan Pengelolaan BMN Lingkup KKP Tahun 2024.....	30
Tabel 20.	Perbandingan Realisasi Tingkat Efektifitas Pengawasan Pengelolaan BMN Lingkup KKP Tahun 2024 dengan Tahun 2023 .....	30
Tabel 21.	Perkembangan Realisasi Tingkat Efektifitas Pengawasan Pengelolaan BMN Lingkup KKP Tahun 2020 – 2024 .....	31
Tabel 22.	Realisasi Tingkat Efektifitas Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup KKP Tahun 2024 .....	32

Tabel 23.	Perbandingan Realisasi Tingkat Efektifitas Pengawasan PBJ Lingkup KKP Tahun 2024 dengan Tahun 2023 dan Target Tahun 2024 .....	32
Tabel 24.	Perkembangan Realisasi Tingkat Efektifitas Pengawasan PBJ LKKP Tahun 2020 – 2024 .....	32
Tabel 25.	Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup KKP Tahun 2024 .....	33
Tabel 26.	Perbandingan Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup KKP Tahun 2024 dengan Tahun 2023 .....	34
Tabel 27.	Perkembangan Realisasi IKU Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Perbaikan Kinerja Lingkup KKP Tahun 2020 - 2024 .....	34
Tabel 28.	Hasil Evaluasi BPKP atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Itjen KKP Tahun 2024 .....	36
Tabel 29.	Perbandingan Realisasi Tingkat Kapabilitas Itjen KKP Tahun 2024 dengan Tahun 2023 .....	36
Tabel 30.	Perkembangan Realisasi Tingkat Kapabilitas Itjen KKP Tahun 2020 – 2024 .....	36
Tabel 31.	Perbandingan Realisasi Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Itjen Tahun 2024 dengan Tahun 2023 .....	37
Tabel 32.	Perkembangan Realisasi Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Itjen tahun 2020 - 2024 .....	37
Tabel 33.	Nilai Indeks Profesionalitas ASN Unit Eselon I lingkup KKP Tahun 2024 .....	38
Tabel 34.	Perbandingan Unit Kerja Itjen yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Tahun 2024 dengan Tahun 2023 .....	39
Tabel 35.	Perkembangan Realisasi Unit Kerja Itjen yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Tahun 2020 - 2024 ....	39
Tabel 36.	Perbandingan Persentase Implementasi Sistem Informasi Pengawasan Lingkup Itjen KKP Tahun 2024 dengan Tahun 2023 .....	40
Tabel 37.	Perkembangan Realisasi Persentase Implementasi Sistem Informasi Pengawasan Lingkup Itjen KKP Tahun 2020 - 2024 .....	40
Tabel 38.	Perbandingan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Itjen KKP Tahun 2024 dengan Tahun 2023 .....	41
Tabel 39.	Perkembangan Realisasi Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Itjen KKP Tahun 2020 – 2024 .....	41
Tabel 40.	Perbandingan Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Itjen KKP Tahun 2024 dengan Tahun 2023 .....	42
Tabel 41.	Perkembangan Realisasi Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Itjen KKP Tahun 2020 – 2024 .....	43
Tabel 42.	Perbandingan Capaian Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Lingkup KKP Tahun 2024 dengan Tahun 2023 .....	44
Tabel 43.	Perkembangan Capaian Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Lingkup KKP Tahun 2020 – 2024 .....	44

Tabel 44.	Realisasi Persentase Pelaksanaan Penugasan Pengawasan dan Pelaporan Hasil Pengawasan yang Memenuhi Standar Pelaksanaan Pengawasan Lingkup Itjen KKP Tahun 2024 .....	45
Tabel 45.	Perbandingan Capaian Persentase Pelaksanaan Penugasan Pengawasan dan Pelaporan Hasil Pengawasan yang Memenuhi Standar Pelaksanaan Pengawasan Lingkup Itjen KKP Tahun 2024 dengan Tahun 2023 dan Target Tahun 2024 .....	45
Tabel 46.	Perkembangan Realisasi Persentase Pelaksanaan Penugasan Pengawasan dan Pelaporan Hasil Pengawasan yang Memenuhi Standar Pelaksanaan Pengawasan Lingkup Itjen KKP Tahun 2020 - 2024 .....	45
Tabel 47.	Hasil Evaluasi Tingkat Kepatuhan Pelaksanaan PKPT Lingkup Itjen KKP Tahun 2024.....	46
Tabel 48.	Perbandingan Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaksanaan PKPT Lingkup Itjen Tahun 2024 dengan Tahun 2023 .....	47
Tabel 49.	Perkembangan Realisasi Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaksanaan PKPT Lingkup Itjen KKP Tahun 2020 - 2024 .....	47
Tabel 50.	Perbandingan Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Lingkup KKP Tahun 2024 dengan Tahun 2023 .....	48
Tabel 51.	Perkembangan Realisasi Indeks Persepsi Pegawai KKP terhadap Kinerja Pengawasan Itjen KKP Tahun 2020-2024 .....	48
Tabel 52.	Realisasi Anggaran Itjen Tahun 2024 (Jenis Belanja)* dengan Pagu Blokir.....	49
Tabel 53.	Realisasi Anggaran Kegiatan Unit Kerja Lingkup Itjen Tahun 2024	50
Tabel 54.	Perkembangan Realisasi Anggaran Itjen KKP TA 2015 - 2024.....	50
Tabel 55.	Realisasi <i>Output</i> Kegiatan Itjen KKP Tahun 2024.....	51
Tabel 56.	Pagu dan Realisasi Anggaran per Sasaran Program Itjen KKP Tahun 2024.....	52
Tabel 57.	Efisiensi Anggaran Itjen KKP Tahun 2024 per Jenis Capaian Kinerja.....	55

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Tugas, Fungsi dan Peran Itjen.....	3
Gambar 2.	Struktur Organisasi Itjen KKP.....	4
Gambar 3.	Dasar Kebijakan Pengawasan Itjen KKP.....	9
Gambar 4.	Jenis Pengawasan Intern Itjen KKP.....	10
Gambar 5.	Peran Pengawasan Itjen KKP terhadap Program <i>Blue Economy</i> ...	10
Gambar 6.	Strategi Pengawasan Intern Itjen KKP.....	11
Gambar 7.	Nilai Kinerja Organisasi Itjen KKP Tahun 2024.....	16
Gambar 8.	Tingkat Kapabilitas APIP berdasarkan Kerangka IACM.....	35
Gambar 9.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Itjen Tahun 2024.....	42

# BAB 1 PENDAHULUAN

## A. LATAR BELAKANG

Arah Kebijakan dan Strategi dalam Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola salah satu pilarnya adalah reformasi sistem akuntabilitas kinerja, melalui penguatan akuntabilitas kinerja organisasi dan reformasi sistem perencanaan dan penganggaran serta pengawasan.

Namun demikian, masih terdapat permasalahan pada tatanan birokrasi, seperti: pelanggaran disiplin, penyalahgunaan wewenang dan maraknya praktek KKN, rendahnya kinerja sumber daya manusia aparatur, sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang belum memadai, rendahnya efisiensi dan efektivitas kerja, serta rendahnya kualitas pelayanan umum.

Untuk itu, diperlukan upaya keras dan sistematis untuk memperbaikinya. Pembangunan birokrasi yang kuat merupakan elemen penting dan diperlukan juga terobosan kinerja secara terpadu, penuh integritas, akuntabel, taat kepada hukum yang berwibawa, dan transparan. Hal-hal tersebut penting karena bermuara pada pencapaian cita-cita pembangunan nasional untuk terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat.

Selaras dengan fungsinya sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Itjen KKP berkewajiban untuk memberikan kontribusi dan kinerja terbaik untuk mewujudkan agenda pembangunan nasional dalam RPJM 2020-2024, yaitu perbaikan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya serta reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas dari korupsi, bermartabat, dan terpercaya.

## B. DASAR HUKUM

Dalam melaksanakan tugas pengawasan intern, Inspektorat Jenderal Itjen KKP mengacu pada peraturan sebagai berikut:

1. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);

3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.7/MEN/2021 tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 5/PERMEN-KP/2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.

### **C. TUGAS, FUNGSI DAN PERAN**

Sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Itjen KKP memiliki tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan KKP. Dalam melaksanakan tugas tersebut Itjen KKP menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan KKP;
2. Pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan KKP terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan KKP;
5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Adapun bila mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dan Kebijakan Pengawasan Tahun 2024, Tugas, Fungsi dan Peran Itjen secara umum disajikan pada Gambar berikut.



Gambar 1. Tugas, Fungsi dan Peran Itjen

#### D. STRUKTUR ORGANISASI

Sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, struktur organisasi Itjen KKP terdiri atas enam unit kerja Eselon II, yaitu:

##### 1. Sekretariat Itjen

Sekretariat Itjen mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan pelaksanaan administrasi kepada seluruh unit organisasi pada Itjen.

##### 2. Inspektorat I

Inspektorat I mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan rencana program, pelaksanaan, pemantauan tindak lanjut hasil, dan pelaporan hasil pengawasan intern pada Sekretariat Jenderal (Setjen), Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (Ditjen PKRL), Pusat Data, Statistik, dan Informasi (Pusdatin), dan Pusat Kebijakan Strategis, unit pelaksana teknis pada Ditjen PKRL, dan unit pelaksana teknis pada Pusdatin.

##### 3. Inspektorat II

Inspektorat II mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan rencana program, pelaksanaan, pemantauan tindak lanjut hasil, dan pelaporan hasil pengawasan intern pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (Ditjen PT) dan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) serta unit pelaksana teknis pada Ditjen PT dan Ditjen PSDKP.

#### 4. Inspektorat III

Inspektorat III mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan rencana program, pelaksanaan, pemantauan tindak lanjut hasil, dan pelaporan hasil pengawasan intern pada Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya (Ditjen PB) dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDMKP) serta unit pelaksana teknis pada Ditjen PB dan BPPSDMKP.

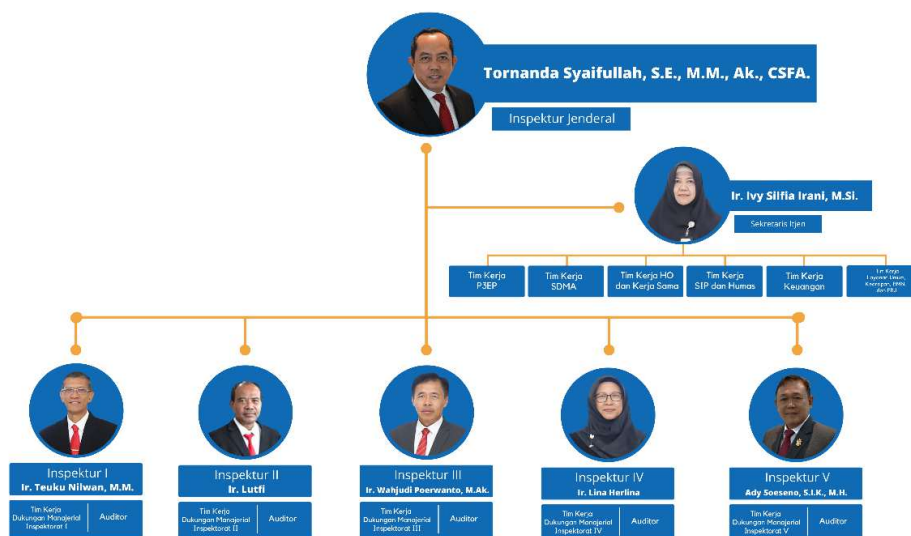
#### 5. Inspektorat IV

Inspektorat IV mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan rencana program, pelaksanaan, pemantauan tindak lanjut hasil, dan pelaporan hasil pengawasan intern pada Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDSPKP) dan Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) serta unit pelaksana teknis pada Ditjen PDSPKP, dan unit pelaksana teknis pada BPPMHKP dan Ditjen PDSPKP.

#### 6. Inspektorat V

Inspektorat V mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan rencana program, pelaksanaan, pemantauan tindak lanjut hasil, dan pelaporan hasil pengawasan intern pada Itjen, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri, serta penanganan pengaduan masyarakat.

Struktur organisasi Itjen KKP disajikan pada Gambar berikut.



Gambar 2. Struktur Organisasi Itjen KKP



## **E. MAKSUD DAN TUJUAN**

Laporan Kinerja Tahun 2024 merupakan salah satu bentuk media informasi dan pertanggungjawaban atas hasil pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran lingkup Itjen Tahun 2024. Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja Tahun 2024 untuk kemudian merumuskan suatu kesimpulan yang dapat menjadi salah satu bahan masukan dan referensi perbaikan kinerja pada periode berikutnya.

## **F. RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup laporan kinerja mencakup pencapaian sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan dan dimandatkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan kepada Inspektur Jenderal dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang diukur sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024.

## **G. METODOLOGI**

Laporan kinerja Tahun 2024 disusun dengan metode:

1. Capaian Kinerja Organisasi
  - a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun berjalan.
  - b. Membandingkan antara realisasi Kinerja serta capaian Kinerja tahun berjalan dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
  - c. Membandingkan antara realisasi Kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
  - d. Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan, dapat berupa kegiatan-kegiatan utama yang dilakukan serta permasalahan yang dihadapi atau perlu diatasi untuk optimalisasi pencapaian kinerja kedepan.
  - e. Analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya.
  - f. Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja.
2. Realisasi Anggaran

Uraian realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

## H. SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika penyusunan laporan meliputi: 1) Pendahuluan yang mencakup Latar Belakang, Dasar Hukum, Tugas, Fungsi dan Peran, Struktur Organisasi, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Metodologi, dan Sistematika Laporan; 2) Perencanaan dan Perjanjian Kinerja yang mencakup Rencana Strategis KKP dan Itjen KKP Tahun 2020 - 2024, Kebijakan Pengawasan, Rencana Kinerja Tahunan, dan Program dan Kegiatan Pengawasan; 3) Akuntabilitas Kinerja yang mencakup penjabaran atas Capaian Kinerja dan Analisis Pengelolaan Sumber Daya Anggaran; dan 4) Penutup yang mencakup Kesimpulan, Permasalahan, dan Rencana perbaikan kinerja (Rekomendasi).

## **BAB 2**

# **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

### **A. RENCANA STRATEGIS KKP DAN ITJEN KKP TAHUN 2020 - 2024**

Sejalan dengan perkembangan kebijakan nasional dan dinamika organisasi lingkup KKP, Rencana Strategis KKP mengalami beberapa perubahan. Perubahan terakhir dari Renstra KKP menjadi dasar bagi unit Eselon I dibawahnya untuk melakukan penajaman terkait dengan Sasaran Program (SP) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) sejalan dengan diterapkannya pengelolaan kinerja berbasis penjenjangan kinerja di lingkungan KKP.

Adapun Visi-Misi KKP berdasarkan Renstra 2020 - 2024 dan penjenjangan pada Itjen KKP sebagai salah satu unit Eselon I dibawahnya dapat disampaikan sebagai berikut:

#### **1. Visi KKP dan Itjen KKP**

Visi KKP, bisa diartikan sebagai keadaan yang ingin dicapai oleh KKP selama 5 (lima) tahun serta gambaran menyeluruh mengenai peranan dan fungsi KKP adalah:

***“Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”***

Dengan visi tersebut diharapkan dapat mewujudkan masa depan bangsa Indonesia yang mampu mengandalkan kemampuannya untuk dapat bersaing dengan bangsa lain. Untuk mendukung visi KKP tersebut, Itjen KKP mempunyai visi:

***“Terwujudnya KKP yang Berintegritas dan Akuntabel dalam Mewujudkan Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera”***

Pernyataan visi tersebut merupakan idealisme, cita-cita, dan harapan dari segenap personil Itjen KKP. Disamping komitmen dan profesionalitas, juga diperlukan dukungan dan kerjasama yang konstruktif dari mitra kerja lingkup KKP.

#### **2. Misi Itjen KKP**

Misi Itjen KKP dirancang sebagai rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi Itjen, yaitu:

- a. *Memberikan Pengawasan Intern Terbaik Untuk Peningkatan Kinerja KKP;*
- b. *Mendorong Pengendalian Intern Yang Efektif Terhadap Sistem dan Tata Kelola KKP;*
- c. *Mendorong Terwujudnya Sumber Daya Aparatur KKP Yang Berintegritas dan Berorientasi Pelayanan Prima.*

Dalam misi tersebut, semakin jelas komitmen Itjen dalam mengawal pelaksanaan program-program KKP antara lain: Peningkatan Kehidupan Nelayan, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan, serta Industrialisasi Kelautan dan Perikanan. Hal tersebut diperlukan demi meningkatkan kinerja KKP yang memiliki visi Pembangunan Kelautan dan Perikanan yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat.

### 3. Tujuan Itjen KKP

Tujuan strategis disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Itjen. Adapun tujuan strategis Itjen KKP adalah:

- a. *Terwujudnya Kinerja KKP yang Efektif dan Efisien;*
- b. *Terciptanya Suatu Sistem dan Tata Kelola KKP yang Baik;*
- c. *Terwujudnya Budaya Integritas di Lingkungan KKP.*

Tujuan yang ingin diwujudkan sudah pada tahapan yang tinggi yaitu efektifitas peran pengawasan internal. Keberhasilan capaian tujuan tersebut diindikasikan dengan capaian Sasaran Program.

### 4. Sasaran Program Itjen KKP

Sebagai unit pengawasan intern, Inspektorat Jenderal mendukung pencapaian Visi dan Misi KKP melalui dua Sasaran Program **“Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah Lingkup KKP”** dan **“Tata Kelola Pengawasan Intern yang Akuntabel dan Efektif”**.

Selanjutnya, sasaran tersebut diuraikan ke level di bawahnya dan diselaraskan pada level 2 yaitu Inspektorat I s.d V dan Sekretariat Itjen.

## B. KEBIJAKAN PENGAWASAN

Kebijakan Pengawasan Itjen KKP disusun untuk memberikan arah, fokus dan pilihan prioritas program dan kegiatan KKP yang akan diawasi pada Tahun 2024. Dengan adanya kebijakan pengawasan ini, pengawasan intern yang dilakukan oleh Itjen diharapkan menjadi lebih tepat sasaran sehingga dapat menghasilkan pengawasan intern yang efektif dan efisien dalam mengawal program/kegiatan KKP, khususnya yang menjadi prioritas pimpinan Kementerian. Dalam prosesnya, Kebijakan Pengawasan Itjen KKP disusun dengan dasar seperti disajikan pada Gambar 3 berikut.



Gambar 3. Dasar Kebijakan Pengawasan Itjen KKP

Dasar kebijakan pengawasan secara umum meliputi hal-hal yang menjadi rujukan dasar bagi pelaksanaan pengawasan intern oleh Itjen di lingkungan KKP dan isu-isu strategis yang perlu menjadi perhatian karena dapat memberikan dampak negatif terhadap kualitas pelaksanaan program/kegiatan serta pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Dengan berlandaskan kepada dasar kebijakan tersebut, maka ditetapkan Kebijakan Pengawasan Itjen KKP Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Dimensi Pengawasan Intern
  - a. Pengawasan terhadap program/kegiatan tahun lalu (*post*)
  - b. Pengawasan terhadap program/kegiatan tahun berjalan (*on-going*)
  - c. Pengawasan terhadap program/kegiatan tahun mendatang
2. Jenis Pengawasan Intern
  - a. Area Pengawasan Program Prioritas
 

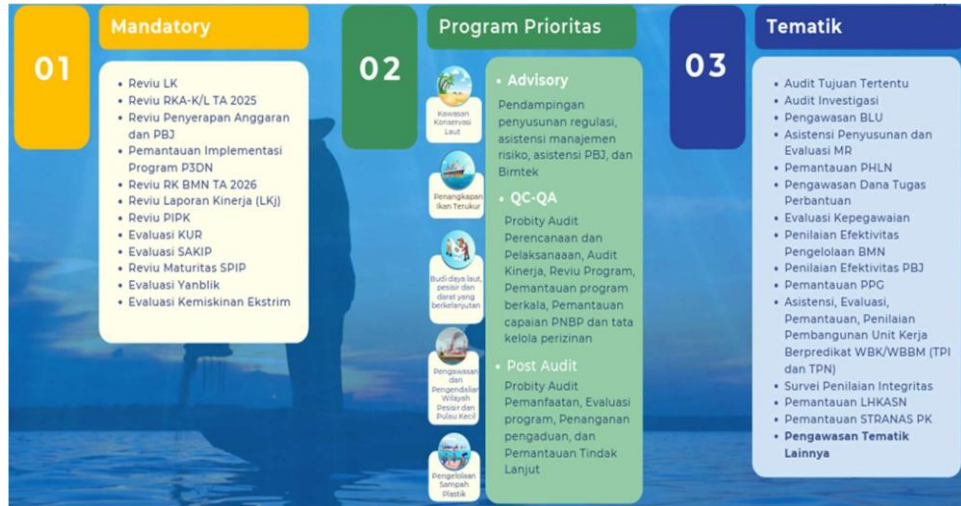
Kegiatan pengawasan pada area ini dilaksanakan dengan objek berupa program prioritas KKP tahun 2024. Pengawasan dilaksanakan dengan jenis kegiatan sebagai berikut:

    - 1) Pengawasan dalam bentuk *advisory*.  
Pengawasan dilaksanakan melalui kegiatan pendampingan penyusunan regulasi, asistensi manajemen risiko, asistensi pengadaan barang/jasa, dan bimbingan teknis yang mendukung pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan KKP
    - 2) Pengawasan dalam bentuk *quality control* dan *quality assurance*
    - 3) Pengawasan dilaksanakan melalui kegiatan probity audit perencanaan dan pelaksanaan, audit kinerja, reuiu program, pemantauan program secara berkala, pemantauan capaian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan tata kelola perizinan
    - 4) Pengawasan dalam bentuk *post audit*

b. Area pengawasan *Mandatory*

c. Area Pengawasan Tematik

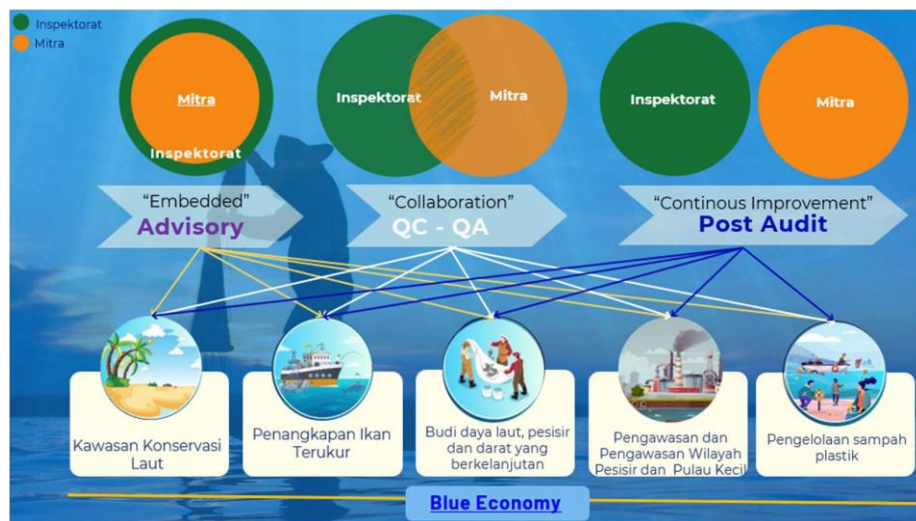
Secara rinci jenis pengawasan Intern Itjen KKP disajikan pada Gambar 4 berikut:



Gambar 4. Jenis Pengawasan Intern Itjen KKP

### 3. Peran Itjen terhadap Program *Blue Economy* Tahun 2024

Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Program *Blue Economy* perlu adanya pengawalan dan pendampingan serta pengawasan yang bersifat solutif. Pengawasan terhadap Program *Blue Economy* dilaksanakan melalui langkah penguatan pengawasan *advisory* pada tahap perencanaan, melakukan peran *Quality Control* dan *Quality Assurance* sebagai bentuk kolaborasi Itjen dengan Unit Kerja Eselon I dan melakukan *Post Audit* sebagai bentuk perbaikan secara berkelanjutan (*Continuous Improvement*). Secara rinci peran pengawasan terhadap Program *Blue Economy* disajikan pada Gambar 5 berikut.



Gambar 5. Peran Pengawasan Itjen KKP terhadap Program *Blue Economy*

#### 4. Strategi Pengawasan Intern

Untuk memberikan nilai tambah atas pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan KKP, Itjen mengambil langkah terhadap strategi pengawasan yang berorientasi pada *Continuous Audit and Continuous Monitoring* (CACM). Strategi pengawasan diimplementasikan melalui:

##### a. Pengawasan Berbasis Risiko

Pengawasan dilakukan dengan penetapan obyek pengawasan yang mengacu pada proses analisis risiko. Analisis risiko dilakukan terhadap beberapa kegiatan, yaitu kegiatan bantuan pemerintah, pengelolaan PNBP, pelayanan publik, tata kelola perizinan, kegiatan barang, dan kegiatan jasa konstruksi.

##### b. Pengembangan Sistem Informasi Pengawasan (SIMWAS) sebagai media *Big Data Analytics*

SIMWAS merupakan media aplikasi yang digunakan dalam pelaksanaan pengawasan, meliputi proses perencanaan pengawasan, pelaksanaan pengawasan, pelaporan pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan. Untuk memberikan nilai tambah, SIMWAS perlu dikembangkan menjadi media Big Data Analytics, antara lain memuat big data mengenai pengadaan barang/jasa bantuan pemerintah, PNBP, realisasi anggaran, dan data tematik mengenai data kelautan dan perikanan.

##### c. Pengawasan Berbasis e-Audit menggunakan *Big Data Analytics*

Pengawasan dilaksanakan dengan memanfaatkan informasi dari hasil *Big Data Analysis*. Pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pengawasan mulai dari perencanaan, pengendalian mutu, penyusunan kertas kerja pengawasan, dan laporan secara digital sampai dengan proses tindak lanjut hasil pengawasan.

Secara rinci Strategi Pengawasan Itjen Tahun 2024 disajikan pada Gambar 6 berikut.



Gambar 6. Strategi Pengawasan Intern Itjen KKP

### C. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Sebagai wujud pelaksanaan Program Dukungan Manajemen Internal Lingkup KKP pada tahun 2024, Itjen KKP melaksanakan 2 (dua) kegiatan utama dengan alokasi anggaran (pagu awal) sebesar Rp87.254.343.000,00 dan dengan adanya pergeseran anggaran dalam rangka pemenuhan belanja pegawai KKP Tahun 2024 sebesar Rp464.432.000,00, maka alokasi anggaran (Pagu Revisi) Itjen KKP menjadi sebesar Rp86.789.911.000,00. Kedua kegiatan tersebut adalah rincian sebagai berikut:

1. Pengawasan Akuntabilitas Aparatur dan Pelaksana Pembangunan KP dengan alokasi anggaran senilai Rp38.387.832.000,00.
2. Dukungan Manajemen Internal Lingkup Inspektorat Jenderal dengan alokasi anggaran senilai Rp48.402.079.000,00.

Selanjutnya, dari alokasi anggaran Itjen KKP Tahun 2024 sebesar Rp86.789.911.000,00, terdapat *Automatic Adjustment* dan Penghematan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp2.293.710.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-1082/MK.02/2023 tanggal 29 Desember 2023 perihal *Automatic Adjustment* (AA) Belanja Kementerian/Lembaga TA 2024, anggaran Itjen KKP yang mendapatkan AA sebesar Rp1.534.750.000,00.
2. Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-1023/MK.02/2024 tanggal 7 November 2024 perihal Langkah-Langkah Penghematan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Kementerian/Lembaga TA 2024, penghematan anggaran perjalanan dinas Itjen KKP sebesar Rp758.960.000,00.

Sehingga pagu efektif Itjen KKP (pasca blokir) *Automatic Adjustment* dan Penghematan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas dari Rp86.789.911.000,00 menjadi Rp84.496.201.000,00.

Sebagai penjabaran sasaran kinerja yang hendak dicapai dalam pengawasan pembangunan kelautan dan perikanan, telah ditetapkan target tiap Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masing-masing sasaran kinerja yang tertuang dalam Penetapan Kinerja berbentuk Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 (Lampiran 1) dan PK Tahun 2024 (revisi) yang disajikan pada tabel berikut.



Tabel 1. Penetapan Kinerja Itjen KKP Tahun 2024 (Revisi)

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target	
Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah Lingkup KKP	1	Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan KKP (%)	≤ 0,5
	2	Nilai Maturitas SPIP KKP (Nilai)	3,3
	3	Unit Kerja KKP Berpredikat Menuju WBK (unit kerja)	105
	4	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP KKP (Nilai)	84 (A)
	5	Nilai Survei Integritas KKP (Nilai)	78
	6	Tingkat Efektivitas Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis lingkup KKP (%)	82
	7	Tingkat Efektifitas Pengawasan Pengelolaan BMN Lingkup KKP (%)	82
	8	Tingkat Efektifitas Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup KKP (%)	82
	9	Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Itjen (%)	80
Tata Kelola Pengawasan Intern yang Akuntabel dan Efektif	10	Tingkat Kapabilitas Itjen KKP (Nilai)	3,5
	11	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Itjen KKP (Indeks)	85
	12	Unit Kerja Itjen yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)	94
	13	Persentase Implementasi Sistem Informasi Pengawasan Lingkup Itjen KKP (%)	88
	14	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Itjen KKP (Nilai)	93,76
	15	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Itjen KKP (Nilai)	81
	16	Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Lingkup KKP (rekomendasi)	18
	17	Persentase Pelaksanaan Penugasan dan Pelaporan Pengawasan yang Memenuhi Standard Mutu Pengawasan Lingkup Itjen (%)	89
	18	Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaksanaan PKPT Lingkup Itjen KKP (%)	80
	19	Indeks Persepsi Pegawai KKP Terhadap Kinerja Pengawasan Itjen (Indeks)	4,16

Penetapan kinerja Itjen KKP Tahun 2024 (Awal) dalam bentuk dokumen Perjanjian Kinerja antara Inspektur Jenderal KKP dengan Menteri Kelautan dan Perikanan disajikan pada Lampiran 1. Adapun dokumen revisi Perjanjian Kinerja yang dilakukan pada bulan Oktober Tahun 2024 terkait adanya perubahan indikator kinerja Nilai Indikator Kinerja Anggaran (NKA) Itjen KKP menjadi Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Itjen KKP disajikan pada Lampiran 2.

#### D. PROGRAM DAN KEGIATAN PENGAWASAN

Dalam rangka pencapaian Sasaran Kinerja sebagai unsur pengawasan intern lingkup KKP, Itjen KKP melaksanakan program “Dukungan Manajemen” dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

1. Pengawasan Akuntabilitas Aparatur dan Pelaksana Pembangunan KP;
2. Dukungan Manajemen Internal Lingkup Inspektorat Jenderal.

Terhadap kegiatan yang telah ditetapkan di atas, dijabarkan lebih rinci ke dalam kegiatan - kegiatan pengawasan, antara lain:

1. Audit (Kinerja dan Tujuan Tertentu);
2. Reviu Laporan Keuangan (LK) KKP dan Mitra Itjen KKP;
3. Reviu SAKIP/Laporan Kinerja (LKj) KKP dan Mitra Itjen KKP;
4. Pemantauan Tindak Lanjut;
5. Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan BMN;
6. Pembinaan Sistem Pengendalian Intern;
7. Evaluasi unit Kerja berstatus WBK/WBBM
8. Reviu Perencanaan Program/Kegiatan Mitra Itjen KKP;
9. Reviu Penganggaran Mitra Kerja Itjen KKP
10. Evaluasi Sistem Pengukuran Kinerja;
11. Pemantauan implementasi Reformasi Birokrasi;
12. Penanganan Pengaduan Masyarakat;
13. Pendampingan Program Pembangunan KP;
14. Pemantauan Program Strategis Bidang KP;
15. Pengawasan Pengadaan Barang dan Jasa Bidang KP.

#### **E. RENCANA AKSI PENCAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA**

Untuk mencapai sasaran kinerja sesuai harapan, diperlukan perencanaan kinerja yang matang dan terukur. Itjen KKP telah menyusun sebuah Rencana Aksi Kinerja berdasarkan Penetapan Kinerja yang telah diperjanjikan untuk memberikan informasi dan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pencapaian sasaran kinerja. Rencana Aksi Kinerja ini memberi informasi mengenai jenis dan waktu pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan untuk mengetahui sejauh mana hasil pelaksanaan kegiatan tersebut menuju pencapaian sasaran kinerja.

Dengan adanya Rencana Aksi diharapkan setiap unit kerja di lingkungan Itjen KKP dapat melaksanakan pencapaian kinerja melalui pelaksanaan kegiatan yang terarah dan terukur sesuai rencana aksi yang telah ditetapkan. Rincian Rencana Aksi Kinerja Pencapaian Target Indikator Kinerja Tahun 2024 disajikan pada Lampiran 2.

## BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA

### A. PENGELOLAAN KINERJA

Pengelolaan kinerja merupakan sebuah sistem manajemen yang perlu dilakukan organisasi didalam mencapai sasaran kinerja yang diharapkan. Dalam hal ini, Itjen KKP membentuk tim pengelola kinerja dari perwakilan masing-masing unit kerja lingkup Itjen untuk melaksanakan pengumpulan data kinerja, kemudian mengukur, dan mengevaluasi perkembangan capaian kinerja secara berkala setiap tiga bulan. Hasil pengukuran tersebut akan memberikan gambaran tingkat keberhasilan dan hambatan dalam pencapaian seluruh sasaran kinerja yang telah diperjanjikan. Data capaian kinerja diolah dan disajikan dalam aplikasi manajemen kinerja berbasis website di *kinerjaku.kkp.go.id* dengan kategorisasi (penentuan posisi) tingkat capaian kinerja yang secara rinci tergambar pada Tabel 2 berikut:

Tabel 2. Rentang Penilaian Capaian Kinerja

No	Warna	Keterangan
1.	Istimewa	Nilai 110 - 120
2.	Baik	Nilai 90 - <110
3.	Cukup	Nilai 70 - <90
4.	Kurang	Nilai 50 - <70
5.	Sangat Kurang	Nilai <50
6.	Belum ada penilaian	

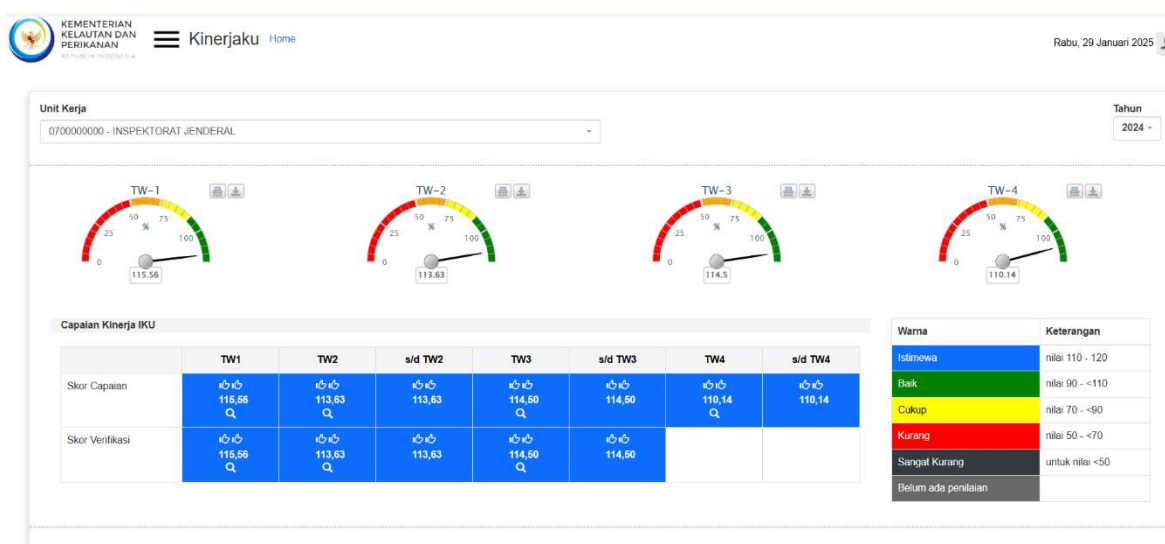
Berdasarkan standar penilaian yang disajikan pada tabel 2 di atas diketahui bahwa untuk mencapai kinerja yang baik maka capaian masing-masing indikator kinerja maupun capaian kinerja secara keseluruhan, minimal harus mencapai nilai setidaknya 90. Oleh karena itu, untuk mencapai kinerja yang optimal, Itjen melakukan pengendalian secara berkala melalui monitoring dan evaluasi pencapaian target kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan.

### B. CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja Tahun 2024 merupakan hasil pelaksanaan program/kegiatan Itjen berupa *output* dan *outcome* yang keberhasilannya dinilai melalui pengukuran kinerja secara sistematis dengan dukungan Sistem Informasi. Pengukuran kinerja instansi pemerintah merupakan tahapan untuk melihat capaian kinerja instansi pemerintah dalam satu tahun anggaran. Sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pengukuran kinerja merupakan tahapan penting untuk membandingkan antara target dalam

penetapan kinerja dengan hasil yang diperoleh melalui pelaksanaan program dan kegiatan. Hasil pengukuran kinerja yang dituangkan kedalam laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah disusun untuk mengukur capaian kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan yang memberikan informasi keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program/kegiatan. Pengukuran dilakukan dengan mengukur capaian atas sasaran program/kinerja yang telah diperjanjikan dalam dokumen penetapan kinerja dengan indikator-indikator kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat capaian suatu sasaran yang telah ditetapkan.

Kondisi capaian kinerja Itjen Tahun 2024 berdasarkan pengukuran kinerja dengan menggunakan aplikasi pengelolaan kinerja dapat disampaikan sebagaimana gambar berikut.



Gambar 7. Nilai Kinerja Organisasi Itjen KKP Tahun 2024

Berdasarkan pada gambar di atas diketahui bahwa capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Itjen Tahun 2024 sebesar **110,14 (predikat “Istimewa”)**. Hal ini menunjukkan upaya pencapaian target kinerja yang telah dilakukan oleh Itjen Tahun 2024 telah optimal. Rincian capaian kinerja Itjen Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3. Capaian Kinerja Kinerja Itjen KKP Tahun 2024

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi (%)	Capaian (%)	Nilai di Aplikasi (%)
Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah Lingkup KKP	1 Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan KKP (%)	≤ 0,5	0,09	181,07	120
	2 Nilai Maturitas SPIP KKP (Nilai)	3,3	3,68	111,52	111,52

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi (%)	Capaian (%)	Nilai di Aplikasi (%)
	3 Unit Kerja KKP Berpredikat Menuju WBK (unit kerja)	105	109	103,81	103,81
	4 Nilai Penilaian Mandiri SAKIP KKP (Nilai)	84	86,11	102,51	102,51
	5 Nilai Survei Integritas KKP (Nilai)	78	80,31	102,96	102,96
	6 Tingkat Efektivitas Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis lingkup KKP (%)	82	88,61	108,06	108,06
	7 Tingkat Efektifitas Pengawasan Pengelolaan BMN Lingkup KKP (%)	82	94,39	115,11	115,11
	8 Tingkat Efektifitas Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup KKP (%)	82	90,93	110,89	110,89
	9 Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Itjen (%)	80	94,02	115,11	115,11
	10 Tingkat Kapabilitas Itjen KKP (Nilai)	3,5	3,70	105,71	105,71
	11 Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Itjen KKP (Indeks)	85	90,82	106,85	106,85
Tata Kelola Pengawasan Intern yang Akuntabel dan Efektif	12 Unit Kerja Itjen yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)	94	127,78	135,94	120
	13 Persentase Implementasi Sistem Informasi Pengawasan Lingkup Itjen KKP (%)	88	100	113,64	113,64
	14 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Itjen KKP (Nilai)	93,76	98,34	104,88	104,88
	15 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Itjen KKP (Nilai)	81	90,61	111,86	111,86
	16 Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Lingkup KKP (rekomendasi)	18	21	116,67	116,67
	17 Persentase Pelaksanaan Penugasan dan Pelaporan Pengawasan yang Memenuhi Standard Mutu Pengawasan Lingkup Itjen (%)	89	98,50	110,67	110,67
	18 Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaksanaan PKPT Lingkup Itjen KKP (%)	80	99,34	124,17	120
	19 Indeks Persepsi Pegawai KKP Terhadap Kinerja Pengawasan Itjen (Indeks)	4,16	4,37	105,05	105,05

Berdasarkan Tabel di atas terlihat bahwa kinerja Itjen Tahun 2024 dapat tercapai dengan hasil memuaskan, hal ini terlihat dari seluruh target indikator kinerja Itjen dapat tercapai melebihi target yang ditetapkan. Perlu diinformasikan bahwa nilai capaian kinerja maksimal pada aplikasi pengelolaan kinerja KKP (*kinerjaku.kkp.go.id*) ditetapkan 120%. Dengan kata lain, persentase capaian pada aplikasi dibatasi pada angka 120% sebagai nilai capaian maksimal. Secara lebih rinci, uraian capaian kinerja dari masing-masing indikator kinerja program Itjen Tahun 2024 disampaikan sebagai berikut.

## Sasaran Program ke-1

### Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah Lingkup KKP

Sasaran program ini ditetapkan sebagai tolok ukur manfaat (*outcome*) yang diharapkan dapat dihasilkan dari pelaksanaan tugas dan fungsi Itjen sebagai APIP dengan fokus pada peningkatan kualitas tata kelola di lingkungan KKP. Tata kelola yang baik merupakan hal yang sangat penting dan fundamental dalam setiap program/kegiatan pembangunan. Dengan tata kelola yang baik, setiap program/kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah diharapkan dapat berjalan secara akuntabel, efektif, dan efisien sehingga dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Untuk itu, sesuai dengan fungsinya, Itjen menjadikan Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah lingkup KKP sebagai Sasaran Program pertama dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi pembangunan Kelautan dan Perikanan. Hal ini juga sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang menerangkan bahwa salah satu fungsi APIP adalah memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Dalam pelaksanaannya, upaya Itjen dalam mendorong terwujudnya tata kelola yang baik di lingkungan KKP diukur dan dipertanggungjawabkan melalui capaian 9 Indikator Kinerja sebagaimana berikut.

#### 1. Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan KKP

Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan KKP adalah jumlah nilai temuan keuangan terbatas pada nilai Tuntutan Ganti Rugi KKP atas hasil pemeriksaan BPK Tahun 2023 dibandingkan dengan realisasi anggaran KKP tahun 2023. Sehubungan dengan realisasi IKU ini menggunakan data hasil pemeriksaan BPK, sehingga frekuensi pengukuran IKU ini bersifat tahunan dan diukur dengan menggunakan polarisasi *minimize* (semakin kecil lebih baik). Pengukuran kinerja IKU ini dilakukan secara tahunan pada Triwulan III Tahun 2024.

Berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Inspektorat Jenderal Nomor 1705/ITJ.0/TU.140/X/2024 perihal Capaian IKU “Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan KKP” dan “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup KKP”, realisasi Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan KKP pada Tahun 2024 sebesar 0,094% dari target  $\leq 0,5\%$  atau dengan capaian 181,07% (nilai maksimal 120% pada aplikasi kinerjaku). Jika dibandingkan dengan tahun 2023, nilai realisasi tahun 2024 lebih rendah atau lebih baik dari

tahun sebelumnya (pengukuran IKU menggunakan polarisasi *minimize*). Nilai capaian tahun 2024 dan perbandingannya dengan tahun lalu disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4. Capaian Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan KKP Tahun 2024 dan Perbandingan dengan Capaian Tahun 2023

Indikator Kinerja Program	2023			2024		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan KKP (%)	≤1%	0,01	199	≤0,5	0,094	181,07

Adapun perkembangan realisasi IKU Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan KKP dari tahun ke tahun disajikan pada tabel 5.

Tabel 5. Perkembangan Realisasi Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan KKP Tahun 2014 - 2024

Indikator Kinerja Program	Tahun											
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan KKP (%)	0,090	0,1506	0,4409	3,64	0.80	0,04	0,18	0,07	0,01	0,12	0,09	

Sumber : Hasil Pengolahan atas Hasil Pengawasan BPK RI terhadap LK KKP

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa pada periode Renstra tahun 2020 – 2024 perkembangan capaian Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas LK KKP menunjukkan trend fluktuatif. Namun demikian, secara keseluruhan IKU ini selalu tercapai di atas dari target yang telah ditetapkan. Upaya yang dilakukan oleh Itjen dalam pencapaian target indikator kinerja ini diantaranya melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ), pengelolaan BMN, pengelolaan keuangan, penerapan SPIP, pendampingan penyusunan Laporan Keuangan, dan Reviu Laporan Keuangan lingkup KKP.

## 2. Tingkat Maturitas SPIP KKP

Tingkat Maturitas Implementasi Sistem Pengendalian Intern (SPI) KKP adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern di lingkungan KKP. Kerangka maturitas SPIP terpola dalam enam tingkatan yaitu: Level 0 (belum ada), Level 1 (rintisan), Level 2 (berkembang), Level 3 (terdefinisi), Level 4 (terkelola dan terukur), dan Level 5 (optimum). Setiap tingkat maturitas mempunyai karakteristik dasar yang menunjukkan peran atau kapabilitas penyelenggaraan SPIP dalam mendukung pencapaian tujuan instansi pemerintah. Pada tahun 2024, Itjen KKP menargetkan Tingkat Maturitas SPIP KKP mencapai Nilai 3,3 atau berada pada Level 3 (Terdefinisi). Level ini secara umum menggambarkan:

1. Kementerian Kelautan dan Perikanan telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik, dan
2. Strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, serta pelaksanaan pengendalian telah dilaksanakan namun belum efektif.

Berdasarkan Surat Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman BPKP Nomor PE.09.03/SP-42/D1/02/2025 perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024, diperoleh hasil bahwa nilai untuk Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP KKP adalah sebesar 3,683 atau telah memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Level 3, sehingga realisasi Tingkat Maturitas SPIP KKP sebesar 3,683 atau 111,52% dari target 3,3. Nilai capaian tahun 2024 dan perbandingannya dengan tahun lalu disajikan pada tabel berikut.

Tabel 6. Perbandingan Realisasi Nilai Maturitas SPIP KKP Tahun 2024 dengan Tahun 2023 dan Target Tahun 2024

Indikator Kinerja Program	2023			2024		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Tingkat Maturitas SPIP KKP (Nilai)	3,1	3,56	114,84	3,3	3,683	111,52

Adapun perkembangan realisasi Tingkat Maturitas SPIP KKP dari tahun ke tahun disajikan pada tabel berikut.

Tabel 7. Perkembangan Realisasi Nilai Maturitas SPIP KKP Tahun 2020 - 2024

Indikator Kinerja Program	2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat Maturitas SPIP KKP (Nilai)	4	3,87	3,50	3,56	3,683

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa pada periode Renstra tahun 2020 – 2024 perkembangan capaian Tingkat Maturitas SPIP KKP menunjukkan angka yang fluktuatif. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan pada target dan cara pengukuran capaian, di mana pada tahun 2020 target yang ditetapkan berupa Level dan nilai capaian diperoleh berdasarkan penilaian mandiri. Begitu juga dengan Tahun 2021, nilai capaian diperoleh berdasarkan penilaian mandiri namun target telah ditetapkan berupa nilai (bukan Level). Sedangkan pada tahun 2022 – 2024 target ditetapkan berupa Nilai dan capaian diperoleh berdasarkan hasil penilaian BPKP. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perkembangan capaian Tingkat Maturitas SPIP KKP pada periode 2020 – 2024 secara umum cenderung meningkat setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi



SPI di lingkungan KKP cukup baik dan hal ini tidak terlepas dari peran Itjen yang terus berupaya mendorong peningkatan kualitas SPI di lingkungan KKP.

Upaya yang dilakukan oleh Itjen untuk mendorong kualitas SPI KKP diantaranya melalui kegiatan Sosialisasi dan konsultasi tentang SPIP, asistensi atau pendampingan dalam penyusunan manajemen risiko (MR), evaluasi manajemen risiko, dan penilaian mandiri maturitas SPI Unit Eselon I dan KKP. Kegiatan pengawasan dalam rangka mendorong peningkatan kualitas SPI KKP akan terus dilanjutkan khususnya untuk memperbaiki beberapa kelemahan yang ditemukan dari hasil penilaian mandiri. Hasil penilaian mandiri menunjukkan masih terdapat kelemahan dalam aktivitas evaluasi dan pendokumentasian kegiatan

Untuk meningkatkan maturitas penyelenggaraan SPIP Kementerian Kelautan dan Perikanan ke tingkat terkelola dan terukur, tim penilaian mandiri menyarankan agar meningkatkan kualitas struktur dan proses dengan mendorong pemanfaatan manajemen risiko dalam pengambilan keputusan dan meningkatkan kompetensi pegawai terkait manajemen risiko serta mengimplementasikan tindak pengendalian terhadap seluruh risiko operasional unit kerja dan risiko strategis unit kerja eselon I dan kementerian.

### **3. Unit Kerja KKP Berpredikat Menuju WBK**

Dalam rangka mendorong upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui perbaikan tata kelola di lingkungan KKP, Itjen menerapkan pembangunan Zona Integritas menjadi salah satu indikator kinerjanya. Dalam prosesnya, pembangunan dan penilaian Zona Integritas mengacu kepada Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah yang sebelumnya diatur dalam Permen PAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014 kemudian diubah menjadi Permen PAN dan RB Nomor 10 Tahun 2019. Berdasarkan pedoman tersebut, suatu unit kerja dinilai telah menuju WBK/WBBM jika memenuhi delapan indikator hasil dan dua puluh indikator proses yang menunjukkan adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh jajaran unit kerja untuk mewujudkan tata kelola yang baik dan bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Dalam pelaksanaannya, penilaian dilakukan oleh Itjen sebagai Tim Penilai Internal (TPI) yang bertugas untuk menguji apakah unit kerja yang diusulkan oleh masing-masing unit eselon I lingkup KKP telah berhasil membangun Zona Integritas menuju WBK untuk kemudian ditetapkan oleh Menteri. Selanjutnya,

unit-unit kerja yang telah ditetapkan sebagai Zona Integritas menuju WBK dapat diusulkan untuk dievaluasi dan ditetapkan sebagai unit kerja menuju WBBM kepada Kementerian PAN dan RB selaku Tim Penilai Nasional (TPN).

Pengukuran capaian indikator kinerja ini berdasarkan jumlah unit kerja yang memenuhi persyaratan WBK berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Lingkungan Instansi Pemerintah dan/atau berdasarkan Permen KP Nomor: 62/PERMEN-KP/2017 Tentang Pedoman Pembangunan dan Penetapan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta ditetapkan oleh Menteri KP. Pada tahun 2024, Itjen menargetkan unit kerja yang mendapatkan predikat menuju WBK di lingkungan KKP sebanyak 105 unit kerja yang dihitung secara kumulatif dari capaian tahun-tahun sebelumnya. Pengukuran indikator kinerja ini dilaksanakan tahunan pada Triwulan IV tahun 2024.

Berdasarkan hasil penilaian internal yang tertuang pada Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 85 Tahun 2024 tentang Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024, Unit Kerja yang Berpredikat Menuju WBK Tahun 2024 terealisasi sebanyak 13 unit kerja, di mana salah satunya merupakan Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan (BPKIL) yang telah mendapatkan predikat WBK pada penilaian sebelumnya. Penilaian terhadap BPKIL kembali dilakukan sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur dari sebelumnya Loka menjadi Balai. Sehubungan dengan hal itu, BPKIL mendapatkan predikat unit kerja menuju WBK untuk ke dua kalinya. Sehingga, untuk penghitungan kumulatif unit kerja menuju WBK sampai dengan tahun 2024, BPKIL tidak masuk dalam hitungan karena telah terhitung sebelumnya di tahun 2021. Secara akumulasi, realisasi unit kerja berpredikat WBK sampai dengan tahun 2024 menjadi 109 unit kerja atau bertambah sebanyak 12 unit kerja (tanpa BPKIL) dari tahun 2023 yang berjumlah 97 unit kerja. Dengan demikian, realisasi jumlah unit kerja berpredikat menuju WBK pada tahun 2024 mencapai 103,81% dari target 105 unit kerja. Secara rinci unit kerja yang ditetapkan sebagai Zona Integritas menuju WBK Tahun 2024 disajikan pada Tabel 8.

Tabel 8. Unit Kerja yang Meraih Predikat Menuju WBK lingkup KKP Tahun 2024 (Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 85 Tahun 2024)

No	Unit Eselon I	Unit Kerja
1.	Setjen	Biro Perencanaan
2.	Setjen	Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri

No	Unit Eselon I	Unit Kerja
3.	Setjen	Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi
4.	DJPT	Pelabuhan Perikanan Nusantara Kwandang
5.	DJPT	Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate
6.	DJPB	Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budi Daya Karawang
7.	DJPB	Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Serang ( <i>tidak dihitung dalam jumlah kumulatif KKP karena telah terhitung mendapatkan predikat menuju WBK pada tahun 2021</i> )
8.	DJPB	Balai Perikanan Budi Daya Air Tawar Tatelu
9.	DJPSPDKP	Direktorat Pengendalian Operasi Armada
10.	BPPSDMKP	Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Bitung
11.	BPPSDMKP	Politeknik Kelautan dan Perikanan Jembrana
12.	BPPSDMKP	Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung
13.	BPPSDMKP	Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang

Secara rinci unit kerja lingkup KKP yang telah meraih predikat menuju WBK/WBBM hingga tahun 2024 disajikan pada Lampiran 3. Adapun Nilai capaian tahun 2024 dan perbandingannya dengan tahun lalu disajikan pada tabel berikut.

Tabel 9. Perbandingan Realisasi Unit Kerja KKP Berpredikat Menuju WBK Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Indikator Kinerja Program	2023			2024		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Unit Kerja KKP Berpredikat Menuju WBK (unit kerja)	90	97	107,78	105	109	103,81

Adapun perkembangan realisasi Unit Kerja KKP Berpredikat Menuju WBK lingkup KKP dari tahun ke tahun disajikan pada tabel berikut.

Tabel 10. Perkembangan Unit Kerja Berpredikat menuju WBK lingkup KKP Tahun 2020 - 2024

Indikator Kinerja Program	2020		2021		2022		2023		2024	
	T	R	T	T	T	R	T	R	T	R
Unit Kerja KKP Berpredikat Menuju WBK (Unit Kerja)	42	48	90	90	72	83	90	97	105	109

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa pada periode Renstra tahun 2020 – 2024 perkembangan capaian Unit Kerja Berpredikat menuju WBK lingkup KKP selalu menunjukkan peningkatan setiap tahunnya dengan jumlah penambahan fluktuatif. Perkembangan ini menunjukkan bahwa KKP memiliki komitmen yang kuat dalam pembangunan Zona Integritas di lingkungannya dan menyadari bahwa pembangunan integritas merupakan kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta memberikan pelayanan publik yang prima dan bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh Itjen dalam mendorong pembangunan Zona Integritas diantaranya sosialisasi, pendampingan, pemantauan, dan penilaian pembangunan Zona Integritas.

#### 4. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP KKP

Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja KKP adalah nilai yang mencerminkan kualitas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) di lingkup KKP dalam periode satu tahun. Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, evaluasi dilaksanakan terhadap komponen – komponen pengelolaan kinerja yang meliputi perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi. Penetapan indikator kinerja ini merupakan upaya untuk meningkatkan akuntabilitas dan kinerja KKP serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada hasil. Pada tahun 2024, Itjen menetapkan target nilai SAKIP KKP sebesar 84 atau kategori A (memuaskan) dengan metode pengukuran berdasarkan hasil penilaian mandiri.

Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP KKP tahun 2024 yang dituangkan dalam Surat Inspektur Jenderal KKP kepada Deputy Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan, Kementerian PANRB dengan Nomor B.242/ITJ/HP.440/VIII/2024 perihal Ikhtisar Hasil Evaluasi Mandiri Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Lingkup KKP, realisasi Nilai Penilaian Mandiri SAKIP KKP Tahun 2024 sebesar 86,11 (predikat memuaskan) atau 102,51% dari target 84. Secara rinci hasil evaluasi untuk unit Eselon I lingkup KKP disajikan pada Tabel 11 berikut.

Tabel 11. Hasil Evaluasi AKIP Unit Eselon I Lingkup KKP Tahun 2024

Unit Kerja	Komponen Manajemen Kinerja (%)				Nilai Hasil Evaluasi Tahun 2024	Predikat Penilaian
	Perencanaan Kinerja	Pengukuran Kinerja	Pelaporan Kinerja	Evaluasi Kinerja		
Setjen	27,04	26,55	13,58	20,81	87,98	A
Itjen	28,50	26,66	12,60	20,50	88,26	A
Ditjen PT	26,85	27,23	13,39	20,72	88,18	A
Ditjen PB	26,40	24,60	12,54	20,50	84,04	A
Ditjen PSDKP	27,60	27,41	13,05	20,50	88,56	A
Ditjen PDSPKP	27,41	26,10	13,05	20,13	86,69	A
Ditjen PKRL	26,51	27,41	13,80	21,34	89,07	A
BPPMHKP	26,63	26,10	12,66	20,66	86,04	A
BPPSDMKP	27,15	27,68	13,50	20,47	88,79	A
<b>KKP</b>	<b>26,46</b>	<b>25,62</b>	<b>13,09</b>	<b>20,94</b>	<b>86,11</b>	<b>A</b>

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, Nilai PM SAKIP KKP Tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 3,91 poin dari nilai 82,20 menjadi 86,11. Capaian positif ini didukung oleh kegiatan pendampingan yang dilaksanakan oleh Itjen secara berkala terhadap pengelolaan kinerja mitra mulai dari tahap perencanaan sampai dengan pelaporan kinerja.

Tabel 12. Perbandingan Realisasi Nilai Penilaian Mandiri SAKIP KKP  
Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Indikator Kinerja Program	2023			2024		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Nilai Penilaian Mandiri SAKIP KKP	80,50	82,20	102,11	84	86,11	102,51

Adapun perkembangan Nilai PM SAKIP KKP lingkup KKP dari tahun ke tahun disajikan pada tabel berikut.

Tabel 13. Perkembangan Nilai PM SAKIP KKP  
Tahun 2020 - 2024

Indikator Kinerja Program	2020	2021	2022*	2023	2024
Nilai Penilaian Mandiri SAKIP KKP (Nilai)	84,88	84,72	80,88	83,18	86,11

Keterangan:

\* Sejak Tahun 2022 Evaluasi SAKIP menggunakan standar penilaian baru atau diimplementasikannya Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa pada periode Renstra tahun 2020 – 2024 perkembangan capaian Nilai PM SAKIP KKP menunjukkan angka yang fluktuatif dengan penurunan cukup signifikan pada tahun 2022. Hal ini salah satunya disebabkan oleh diperlukannya penyesuaian dengan penerapan pedoman Evaluasi SAKIP yang baru berdasarkan Peraturan MenPANRB No. 88 Tahun 2021.

## 5. Nilai Survei Integritas KKP

Nilai Survei Integritas KKP merupakan nilai yang diperoleh dari hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara tahunan. Survei ini ditujukan untuk memetakan risiko korupsi dan kemajuan upaya pencegahan korupsi yang dilakukan oleh kementerian, lembaga dan pemerintah daerah. Hasil pemetaan tersebut dapat dijadikan dasar untuk menyusun rekomendasi peningkatan upaya pencegahan korupsi dengan rencana aksi yang sesuai karakteristik instansi masing-masing. Pada Tahun 2024, Nilai Integritas KKP ditargetkan sebesar 78 dan pengukuran dilakukan secara tahunan berdasarkan hasil survei Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Berdasarkan hasil survei KPK, diperoleh Nilai Survei Integritas KKP sebesar Tahun 2024 mencapai 80,31 (kategori Terjaga) atau 102,96% dari target 78. Nilai ini berada di atas nilai rata-rata nasional sebesar 71,53 dan lebih baik (meningkat 1,12 poin) dari capaian tahun sebelumnya sebesar 79,19.

Tabel 14. Perbandingan Realisasi Nilai Survei Integritas KKP Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Indikator Kinerja Program	2023			2024		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Nilai Survei Integritas KKP (Nilai)	76	79,19	104,20	78	80,31	102,96

Perlu kami sampaikan bahwa Indikator Kinerja Nilai Survei Integritas KKP mulai ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja sejak tahun 2021 dengan perkembangan nilai capaian dari tahun ke tahun disajikan pada tabel berikut.

Tabel 15. Perkembangan Realisasi Nilai Survei Integritas KKP Tahun 2020 - 2024

Indikator Kinerja Program	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai Survei Integritas KKP (Nilai)	-	83,1	80,32	79,19	80,31

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa sejak diterapkan sebagai indikator kinerja pada tahun 2021 hingga 2024, perkembangan capaian Nilai Survei Integritas KKP menunjukkan trend yang cenderung menurun di periode tahun 2021 – 2023 dan kemudian meningkat di tahun 2024. Penyebab terjadinya trend capaian ini dipengaruhi oleh tingkat kepuasan masyarakat terhadap tingkat layanan publik yang diberikan oleh KKP. Namun dapat disampaikan bahwa secara umum dari tahun ke tahun capaian Nilai Survei Integritas KKP selalu berada di atas target dan nilai rata-rata nasional.

Capaian positif ini tidak terlepas dari kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh Itjen untuk membangun budaya integritas diantaranya melalui kegiatan pengawasan pembangunan Zona Integritas, Pengendalian Gratifikasi, internalisasi nilai-nilai integritas kepada seluruh unit kerja dan masyarakat yang menjadi *Stakeholders* KKP, Evaluasi LHKASN, dan pengelolaan saluran pengaduan masyarakat.

## 6. Tingkat Efektifitas Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis Lingkup KKP

Indikator kinerja ini ditujukan untuk menjaga kualitas pengawasan dan mendorong tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis lingkup KKP. Dalam hal ini, kegiatan prioritas/strategis yang menjadi fokus pengukuran adalah kegiatan Bantuan Pemerintah yang dilaksanakan pada tahun sebelumnya (T-1) oleh unit eselon I lingkup KKP. Secara garis besar, pengukuran IKU ini dilakukan dengan menggunakan parameter penilaian kualitas kegiatan Bantuan Pemerintah yang dilaksanakan oleh unit eselon I dan kualitas pengawasan kegiatan pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan oleh

Itjen. Pada Tahun 2024, target yang ditetapkan untuk IKU ini adalah sebesar 82% yang diukur secara tahunan pada Triwulan IV Tahun 2024.

Dalam pelaksanaannya, pengukuran dilakukan melalui kegiatan evaluasi terhadap kegiatan Bantuan Pemerintah lingkup KKP dengan menggunakan Parameter penilaian yang digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan Bantuan Pemerintah meliputi:

1. Pencapaian Tujuan (PT) yang diukur berdasarkan kesesuaian tujuan pelaksanaan kegiatan sesuai Petunjuk Teknis masing-masing jenis bantuan, dengan bobot 80%;
2. Integrasi (IG) yang diukur berdasarkan pemahaman penerima atas hak dan kewajiban, dengan bobot 10%; dan
3. Adaptasi (AT) yang diukur berdasarkan kemampuan penerima mengembangkan bantuan, dengan bobot 10%.

Dalam rangka penilaian IKU Efektivitas Kegiatan Prioritas/Bantuan Pemerintah Tahun 2024, Itjen KKP telah melakukan evaluasi terhadap kegiatan prioritas/bantuan pemerintah tersebut yang dilakukan secara uji petik dengan melibatkan Penyuluh Perikanan dan Auditor Inspektorat Jenderal, pada tanggal 2 Oktober s.d. 8 November 2024, meliputi kegiatan lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT), Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya (DJPB), Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (DJPDS), dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (DJPRL) TA 2023. Uji petik dilakukan terhadap 282 kelompok penerima bantuan pada 12 provinsi, yaitu Provinsi: 1) Bali; 2) Jawa Barat; 3) Jawa Tengah; 4) Jawa Timur; 5) Lampung; 6) Maluku; 7) Maluku Utara; 8) Nusa Tenggara Barat; 9) Papua; 10) Sulawesi Selatan; 11) Sulawesi Tenggara; dan 12) Sulawesi Utara. Rincian jenis dan jumlah bantuan serta kabupaten/kota penerima disajikan pada Lampiran 4.

Berdasarkan Memorandum Inspektur III Nomor 469/ITJ.3/TU.140/XI/2024, perihal Perbaikan Laporan Hasil Evaluasi Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Bantuan Pemerintah Lingkup KKP TA 2023, realisasi Tingkat Efektivitas Pengawasan Kegiatan Prioritas/Bantuan Pemerintah lingkup KKP mencapai 88,61% atau 108,06% dari target 82%. Rincian penilaian atas tingkat efektivitas pengawasan kegiatan prioritas/bantuan pemerintah disajikan pada tabel berikut.

Tabel 16. Hasil Evaluasi Tingkat Efektivitas Pengawasan Kegiatan Prioritas/Strategis (Bantuan Pemerintah) Lingkup KKP Tahun 2023

Unit Kerja Eselon I	Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Banper	Efektivitas Pengawasan PBJ	Tingkat Efektivitas Pengawasan Kegiatan Prioritas/Banper*	Nilai Itjen
DJPKRL	93,29	86,54	89,92	88,61
DJPT	90,80	84,06	87,43	
DJPB	82,56	89,22	85,89	
DJPDSKP	92,44	90,00	91,22	

Keterangan:

\* Efektivitas Pengawasan Kegiatan Prioritas/Banper merupakan rata-rata dari Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Banper dan Efektivitas Pengawasan PBJ

Berdasarkan hasil evaluasi, nilai tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/bantuan pemerintah lingkup KKP Tahun 2024 secara rinci disajikan pada Lampiran 4. Merujuk hasil evaluasi pada tabel diatas, masih terdapat pemanfaatan bantuan yang belum sepenuhnya efektif, yaitu:

1. Pencapaian Tujuan (PT) memperoleh skor 75,87, disebabkan antara lain adanya 13 kelompok yang belum memanfaatkan bantuan, belum memperoleh manfaat bantuan, atau tidak melanjutkan pemanfaatan bantuan sesuai dengan tujuan penyaluran bantuan.
2. Integrasi (IG) memperoleh skor 8,08, disebabkan antara lain kelompok penerima belum sepenuhnya memahami kewajiban untuk melakukan pelaporan atas pemanfaatan bantuan yang telah diterima.
3. Adaptasi (AT) memperoleh skor 6,01, disebabkan antara lain kelompok penerima belum berhasil mengembangkan bantuan yang diterimanya, baik untuk pengembangan usaha kelompok maupun menjadi acuan masyarakat lain dalam usaha perikanan dan kelautan.

Terhadap hasil evaluasi terhadap masing-masing mitra (DJPT, DJPB, DJPDSKP, dan DJPKRL) tersebut, telah dilakukan pembahasan dan pemberian rekomendasi perbaikan oleh Itjen terkait guna perbaikan untuk meningkatkan efektivitas pemanfaatan bantuan pemerintah sesuai tujuan penyalurannya.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, capaian tahun 2024 sedikit lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini dipengaruhi oleh tingkat pemanfaatan bantuan oleh penerima manfaat yang lebih rendah dari tahun sebelumnya.

Tabel 17. Perbandingan Capaian Tingkat Efektivitas Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/ Strategis Lingkup KKP Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Indikator Kinerja Program	2023			2024		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Tingkat Efektivitas Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis Lingkup KKP (%)	81	89,31	110,26	82	88,61	108,06



Adapun perkembangan Nilai PM SAKIP KKP lingkup KKP dari tahun ke tahun disajikan pada tabel berikut.

Tabel 18. Perkembangan Realisasi Tingkat Efektifitas Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis Lingkup KKP Tahun 2020 - 2024

Indikator Kinerja Program	2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat Efektifitas Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis Lingkup KKP (%)	84,36	87,43	90,39	89,31	88,61

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa pada periode Renstra tahun 2020 – 2024 perkembangan capaian Tingkat Efektifitas Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis Lingkup KKP menunjukkan angka yang fluktuatif. Secara umum fluktuasi nilai capaian ini dipengaruhi oleh tingkat pemanfaatan bantuan oleh masyarakat penerima manfaat. Lebih lanjut, dapat disampaikan bahwa dari tahun ke tahun capaian indikator kinerja ini selalu berada di atas target. Capaian positif ini didukung oleh kegiatan pengawasan Itjen yang dilaksanakan secara intensif proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan bantuan pemerintah lingkup KKP.

## 7. Tingkat Efektifitas Pengawasan Pengelolaan BMN Lingkup KKP

Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan KKP merupakan salah satu kegiatan strategis yang mendukung dan menentukan keberhasilan pencapaian tujuan organisasi. Pengelolaan BMN mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KKP dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas laporan keuangan. Keterlibatan sumber daya yang besar dalam pengelolaan BMN seringkali diikuti dengan berbagai hambatan/permasalahan, dan bahkan menjadi temuan berulang aparat pengawasan internal maupun eksternal. Pengawasan terhadap pengelolaan BMN diperlukan untuk memastikan kegiatan telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan mendukung pencapaian tujuan organisasi.

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Kementerian melalui kegiatan pengelolaan BMN, Itjen KKP telah menetapkan Tingkat Efektifitas Pengawasan Pengelolaan BMN Lingkup KKP sebagai salah satu Indikator Kinerja pada tahun 2024. Hal ini ditujukan untuk mengukur tingkat keberhasilan Itjen KKP dalam pengawasan pengelolaan BMN di lingkungan KKP. Indikator kinerja tersebut merupakan suatu ukuran yang menggambarkan efektivitas kualitas kinerja pengawasan intern KKP dalam mengawal dan memastikan pengelolaan BMN lingkup KKP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada tahun

2024, tingkat Efektivitas Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan BMN ditargetkan mencapai 82% dan diukur secara tahunan dengan komponen yang meliputi: 1) Kualitas Perencanaan Pengawasan; 2) Kualitas Pelaksanaan Pengawasan; dan 3) Nilai Rata-rata Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Unit Eselon I lingkup KKP.

Berdasarkan Memorandum Inspektur I Nomor 267/ITJ.1/HP.660/XII/2024 perihal Hasil Pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) Tingkat Efektivitas Pengawasan BMN Lingkup KKP Tahun 2024, realisasi Tingkat Efektivitas Pengawasan BMN Lingkup KKP Tahun 2024 adalah 94,39% atau 115,11% dari target 82%. Rincian penilaian Tingkat Efektivitas Pengawasan BMN Lingkup KKP Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 19. Realisasi Tingkat Efektivitas Pengawasan Pengelolaan BMN Lingkup KKP Tahun 2024

No	Unit Eselon I	Nilai (%)				IKU level I
		Indikator 1*)	Indikator 2**)	Indikator 3***)	Total	
1.	Sekretariat Jenderal	10,00	40,00	37,50	87,50	94,39
2.	Ditjen PKRL	10,00	38,00	40,00	88,00	
3.	Ditjen Perikanan Tangkap	20,00	40,00	38,00	98,00	
4.	Ditjen PSDKP	20,00	40,00	40,00	100,00	
5.	Ditjen Perikanan Budidaya	20,00	38,00	37,00	95,00	
6.	BPPSDMKP	10,00	40,00	38,00	88,00	
7.	Ditjen PDSPKP	20,00	40,00	37,00	97,00	
8.	BPPMHKP	20,00	40,00	39,00	99,00	
9.	Inspektorat Jenderal	20,00	38,00	39,00	97,00	

Keterangan:

\* : Kualitas Perencanaan Pengawasan

\*\* : Kualitas Pelaksanaan Pengawasan

\*\*\* : Nilai Rata-rata Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Unit Eselon I

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, Tingkat Efektivitas Pengawasan BMN Lingkup KKP Tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 5,07 poin dari nilai 89,31 menjadi 94,39. Hal ini dipengaruhi oleh meningkatnya tingkat kepatuhan pengelolaan BMN pada beberapa unit eselon I khususnya pada aspek ketertiban administrasi pengelolaan BMN.

Tabel 20. Perbandingan Realisasi Tingkat Efektivitas Pengawasan Pengelolaan BMN Lingkup KKP Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Indikator Kinerja Program	2023			2024		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Tingkat Efektivitas Pengawasan Pengelolaan BMN Lingkup KKP (%)	81	89,31	110,26	82	94,39	115,11

Adapun perkembangan Tingkat Efektivitas Pengawasan BMN Lingkup KKP Tahun 2024 dari tahun ke tahun disajikan pada tabel berikut.

Tabel 21. Perkembangan Realisasi Tingkat Efektifitas Pengawasan Pengelolaan BMN Lingkup KKP Tahun 2020 - 2024

Indikator Kinerja Program	2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat Efektifitas Pengawasan Pengelolaan BMN Lingkup KKP (%)	86,11	87,35	95,33	92,83	94,39

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa pada periode Renstra tahun 2020 – 2024 perkembangan capaian Tingkat Efektifitas Pengawasan BMN Lingkup KKP Tahun 2024 secara umum menunjukkan trend meningkat dari tahun ke tahun. Pencapaian kinerja positif ini didukung oleh kegiatan pengawasan (*assurance* dan *consulting*) dalam pengelolaan BMN, diantaranya pendampingan dan review atas pengelolaan BMN unit eselon I lingkup KKP.

#### 8. Tingkat Efektifitas Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup KKP

Pengadaan barang/jasa merupakan bagian dari aktivitas pembangunan yang rutin dilaksanakan oleh instansi pemerintah setiap tahunnya. Kegiatan ini sangat strategis dan penting untuk dilakukan pengawasan karena bernilai besar, mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi, dapat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan organisasi, mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik, dan menentukan kualitas Laporan Keuangan. Karenanya, pengawasan yang efektif diperlukan untuk memastikan kesesuaian hasil pelaksanaan terhadap perencanaan, prosedur dan aturan yang berlaku.

Dalam rangka mendorong pengawasan PBJ yang efektif pada tahun 2024, Itjen menetapkan indikator kinerja Tingkat Efektivitas Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa dengan target 82% sebagai suatu ukuran untuk menggambarkan kualitas kinerja pengawasan Itjen dalam mengawal dan memastikan pelaksanaan pengadaan barang/jasa lingkup KKP dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan ketentuan yang berlaku. Pengukuran dilaksanakan secara tahunan pada Triwulan IV Tahun 2024 melalui kegiatan evaluasi dengan komponen penilaian meliputi: 1) Kualitas Perencanaan Pengawasan; 2) Kualitas Pelaksanaan Pengawasan; dan 3) Nilai Rata-rata Tingkat Kepatuhan PBJ Unit Eselon I lingkup KKP.

Berdasarkan Memorandum Plh. Inspektur II Nomor 309/ITJ.2/TU.130/XII/2024 perihal Hasil Penilaian/Pengukuran Indikator Kinerja Utama Efektivitas Pengawasan dan Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup KKP Tahun 2024, realisasi Tingkat Efektifitas Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup KKP adalah 90,93% atau 110,89% dari target 82%. Secara rinci, Tingkat Efektifitas Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup KKP disajikan pada tabel berikut.

Tabel 22. Realisasi Tingkat Efektifitas Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup KKP Tahun 2024

No	Unit Eselon I	Nilai (%)				IKU level I
		Indikator 1*)	Indikator 2**)	Indikator 3***)	Total	
1.	Sekretariat Jenderal	16,70	40,00	34,64	91,34	90,93
2.	Ditjen PKRL	16,70	40,00	33,86	90,56	
3.	Ditjen Perikanan Tangkap	20,00	40,00	38,02	98,02	
4.	Ditjen PSDKP	18,35	40,00	32,64	90,99	
5.	Ditjen Perikanan Budidaya	20,00	40,00	31,14	91,14	
6.	BPPSDMKP	18,35	40,00	31,18	89,53	
7.	Ditjen PDSPKP	20,00	40,00	32,32	92,32	
8.	BPPMHKP	20,00	40,00	31,98	91,98	
9.	Inspektorat Jenderal	16,70	30,00	40,00	86,70	

Keterangan:

\* : Kualitas Perencanaan Pengawasan

\*\* : Kualitas Pelaksanaan Pengawasan

\*\*\* : Nilai Rata-rata Tingkat Kepatuhan Pengadaan B/J Unit Eselon I

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, Tingkat Efektifitas Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup KKP tahun 2024 lebih rendah sebesar 0,04 poin dari nilai tahun 2023 sebesar 90,97. Hal ini dipengaruhi oleh adanya penurunan skor pada aspek tingkat tindak lanjut hasil pengawasan PBJ unit Eselon I.

Tabel 23. Perbandingan Realisasi Tingkat Efektifitas Pengawasan Pengawasan PBJ Lingkup KKP Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Indikator Kinerja Program	2023			2024		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Tingkat Efektifitas Pengawasan Pengadaan PBJ Lingkup KKP (%)	81	90,97	112,31	82	90,93	110,89

Adapun perkembangan Tingkat Efektifitas Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup KKP dari tahun ke tahun disajikan pada tabel berikut.

Tabel 24. Perkembangan Realisasi Tingkat Efektifitas Pengawasan PBJ lingkup KKP Tahun 2020 - 2024

Indikator Kinerja Program	2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat Efektifitas Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa KKP (%)	86,82	85,27	88,01	90,97	90,93

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa pada periode Renstra tahun 2020 – 2024 perkembangan capaian Tingkat Efektifitas Pengawasan Terhadap Pengadaan Barang/Jasa Lingkup KKP berjalan fluktuatif dari tahun ke tahun. Kondisi ini dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan unit kerja dalam hal mengumumkan seluruh Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dan kualitas administrasi pengadaan barang/jasa. Namun demikian, secara umum capaian Tingkat Efektifitas Pengawasan Terhadap Pengadaan Barang/Jasa Lingkup KKP dapat tercapai di atas target setiap tahunnya.

## 9. Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup KKP

Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja adalah jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen KKP yang ditindaklanjuti secara tuntas oleh seluruh mitra kerja yang menjadi objek pengawasan (Audit, Reviu, Evaluasi dan Pemantauan) selama periode satu tahun dengan target 80%. Capaian indikator kinerja ini dihitung berdasarkan jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang terbit pada periode 1 Oktober 2023 s.d. 30 September 2024 (Triwulan III Tahun 2024) yang telah ditindaklanjuti secara tuntas oleh unit eselon I sampai dengan 31 Desember Tahun 2024 (Triwulan IV Tahun 2024).

Berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Inspektorat Jenderal Nomor 51/ITJ.0/TU.140/I/2025 perihal Capaian IKU “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Unit Eselon I Lingkup KKP” Tahun 2024”, realisasi Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup KKP Tahun 2024 sebesar 94,02% (tuntas 3162 dari 3363 rekomendasi) dari target 80% atau tercapai 117,53% dari target. Secara rinci, realisasi pemanfaatan rekomendasi hasil pengawasan Itjen per unit Eselon I lingkup KKP disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 25. Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup KKP Tahun 2024

No	Unit Kerja	Jumlah Rekom	Tindak Lanjut (Tuntas)	% Tuntas	Sisa Rekom	(%) Sisa Rekom
1	Setjen	196	196	100,00	0	0,00
2	Ditjen PKPRL	453	434	95,81	19	4,19
3	Ditjen Perikanan Tangkap	640	542	84,69	98	15,31
4	Ditjen PSDKP	126	126	100,00	0	0,00
5	Ditjen Perikanan Budi Daya	841	790	93,94	51	6,06
6	BPPSDMKP	454	451	99,34	3	0,66
7	Ditjen PDSPKP	193	188	97,41	5	2,59
8	BPPMHKP	395	372	94,18	23	5,82
9	Itjen	65	63	96,92	2	3,08
<b>TOTAL</b>		<b>3363</b>	<b>3162</b>	<b>94,02</b>	<b>201</b>	<b>5,98</b>

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Unit Eselon I Lingkup KKP mengalami peningkatan sebesar 2,5 poin dari nilai 91,52 menjadi 94,02. Capaian positif ini didukung oleh semakin optimalnya pemanfaatan Sistem Informasi dalam proses Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.

Tabel 26. Perbandingan Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup KKP Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Indikator Kinerja Program	2023			2024		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup KKP	75	91,52	122,03	80	94,02	117,53

Adapun perkembangan Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Perbaikan Kinerja Lingkup KKP dari tahun ke tahun disajikan pada tabel berikut

Tabel 27. Perkembangan Realisasi IKU Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Perbaikan Kinerja Lingkup KKP Tahun 2020 - 2024

Indikator Kinerja Program	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup KKP	83,77	89,83	92,11	91,52	94,02

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa pada periode Renstra tahun 2020 – 2024 perkembangan capaian Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Perbaikan Kinerja Lingkup KKP menunjukkan trend positif di mana secara umum semakin meningkat dari tahun ke tahun.

## Sasaran Program ke-2

### Tata Kelola Pengawasan Intern yang Akuntabel dan Efektif

Tata kelola yang baik menjadi hal fundamental bagi terwujudnya pengawasan intern yang berkualitas dan dapat memberikan nilai tambah bagi organisasi. Karenanya, sasaran program ke-2 ini ditetapkan untuk mendukung pencapaian sasaran program ke-1 “Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah Lingkup KKP. Keberhasilan tercapainya Sasaran Program ke-2 diukur melalui pencapaian 10 indikator kinerja dengan uraian sebagai berikut:

#### 10. Tingkat Kapabilitas Itjen KKP

*Internal Audit Capability Model* (IACM) adalah suatu kerangka kerja yang dikembangkan oleh *The Institute of Internal Auditors Research Foundation* (IIARF) untuk memperkuat atau meningkatkan audit intern melalui langkah evolusi kecil yang terdiri dari 5 (lima) level kapabilitas progresif, yaitu: (1) *initial*; (2) *structured*; (3) *delivered*; (4) *institutionalized*; dan (5) *optimized*. Bila dilihat dari fungsi dan manfaatnya, IACM merupakan:

1. Sarana komunikasi (*communication vehicles*): dasar untuk mengkomunikasikan apa yang disebut sebagai audit intern yang efektif dan bagaimana audit intern melayani organisasi dan para pemangku kepentingan, dan untuk menunjukkan pentingnya audit intern bagi pengambil keputusan.

2. Kerangka penilaian (*framework for assessment*): kerangka untuk menilai kemampuan unit audit intern dalam memenuhi standar profesional dan praktik audit intern, baik melalui penilaian sendiri atau penilaian eksternal.
3. Peta jalan perbaikan secara terarah (*road map for orderly improvement*): peta jalan untuk membangun kemampuan dengan menetapkan langkah-langkah organisasi yang dapat diterapkan dalam rangka membangun dan memperkuat kegiatan audit intern.

Dengan kata lain, IACM merupakan kerangka yang menggambarkan hal-hal mendasar yang dibutuhkan untuk mewujudkan pengawasan intern sektor publik yang efektif dimana setiap level kapabilitas menggambarkan karakteristik dan kapabilitas unit audit intern pada level tersebut. Dalam pelaksanaannya, penilaian tingkat kapabilitas APIP dengan metode IACM dilakukan oleh BPKP, namun demikian dalam hal BPKP tidak melakukan penilaian maka APIP dapat melakukan penilaian secara mandiri. BPKP melakukan penilaian terhadap tingkat kapabilitas Itjen KKP tahun 2024. Sedangkan karakteristik kapasitas APIP dapat disampaikan sebagai berikut:



Gambar 8. Tingkat Kapabilitas APIP berdasarkan Kerangka IACM

Target Tingkat Kapabilitas Itjen KKP Tahun 2024 ditetapkan pada nilai 3,5 (Level 3) di mana pengukurannya dilakukan secara tahunan pada Triwulan IV Tahun 2024.

Berdasarkan Surat Direktur Pengawasan Bidang Pangan, Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Alam BPKP Nomor PE.09/LHP-221/D102/1/2024 perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Tahun 2024 pada Itjen KKP, diketahui bahwa Itjen KKP berada pada “**Level 3**” dengan skor 3,70 dan karakteristik “**delivered**”, yang berarti Itjen KKP telah melaksanakan aktivitas pengawasan (*assurance* dan *consulting*) sesuai dengan standar dan hasil pengawasan APIP sudah berkualitas dalam memberikan keyakinan memadai atas ketaatan dan 3E, peringatan dini dan peningkatan efektivitas

manajemen risiko, serta perbaikan tata kelola. Secara rinci hasil evaluasi oleh BPKP disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 28. Hasil Evaluasi BPKP atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Itjen KKP Tahun 2024

No.	Elemen	PM		Evaluasi	
		Level	Skor	Level	Skor
Komponen Dukungan Pengawasan ( <i>Enabler</i> )					
1.	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	4	0,72	4	0,72
2.	Praktik Profesional	4	0,72	4	0,72
3.	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	4	0,25	4	0,24
4.	Budaya dan Hubungan Organisasi	5	0,30	4	0,24
5.	Struktur Tata Kelola	4	0,56	4	0,48
Komponen Aktivitas Pengawasan ( <i>Delivery</i> ) dan Kualitas Pengawasan ( <i>Result</i> )					
6.	Peran dan Layanan	4	1,70	3	1,30
<b>Simpulan Entitas</b>		<b>3</b>	<b>4,25</b>	<b>3</b>	<b>3,70</b>

Sumber : BPKP

Dengan demikian, realisasi Tingkat Kapabilitas Itjen KKP Tahun 2024 mencapai nilai 3,70 atau 105,71% dari target nilai 3,5. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, nilai tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 0,09 poin dari nilai 3,61 menjadi 3,7.

Tabel 29. Perbandingan Realisasi Tingkat Kapabilitas Itjen KKP Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Indikator Kinerja Program	2023			2024		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Tingkat Kapabilitas Itjen KKP	3,1	3,61	116,45	3,5	3,70	105,71

Adapun perkembangan Tingkat Kapabilitas Itjen KKP dari tahun ke tahun disajikan pada tabel berikut.

Tabel 30. Perkembangan Realisasi Tingkat Kapabilitas Itjen KKP Tahun 2020 - 2024

Indikator Kinerja Program	2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat Kapabilitas Itjen KKP (Nilai)	3	3,87	3,55	3,61	3,70

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa pada periode Renstra tahun 2020 – 2024 perkembangan capaian Tingkat Kapabilitas Itjen KKP menunjukkan trend positif dengan nilai setiap tahun cenderung meningkat. Dalam ini perlu disampaikan bahwa, nilai capaian tahun 2021 cukup tinggi karena menggunakan hasil penilaian mandiri sebagaimana pada tahun tersebut BPKP tidak melakukan penilaian. Sedangkan untuk tahun lainnya menggunakan hasil penilaian dari BPKP.

Salah satu faktor utama yang mempengaruhi capaian positif dalam perkembangan tingkat kapabilitas Itjen adalah adanya Tim Peningkatan Kapabilitas Itjen yang ditetapkan oleh Inspektur Jenderal untuk memenuhi *Area of Improvement* IACM.



## 11. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Itjen

Indeks Profesionalitas ASN adalah suatu ukuran penilaian yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan ASN dalam pelaksanaan tugas jabatan (Permen PAN dan RB Nomor 38 Tahun 2018). Pada Tahun 2024, target nilai Indeks Profesionalitas ASN lingkup Itjen ditetapkan sebesar 85 dengan unsur penilaian meliputi :

1. Kualifikasi/Tingkat Pendidikan dan Jenjang Jabatan dari Aplikasi e-Pegawai KKP;
2. Kompetensi (Diklat Struktural, Diklat Fungsional, Diklat Teknis 20 JP dan Seminar) dari Aplikasi SIASN BKN;
3. Kinerja atau SKP dari Aplikasi SIASN BKN dan Aplikasi Kinerja BKN;
4. Disiplin atau SK Penjatuhan Hukuman Disiplin dari Aplikasi e-Pegawai KKP.

Berdasarkan Nota Dinas Kepala Biro SDM Aparatur dan Organisasi KKP Nomor B.62/SJ.3/TU.140/I/2025 Tanggal 9 Januari 2025 perihal Capaian Indikator Kinerja Utama Indeks Profesionalitas ASN di lingkungan KKP Triwulan IV Tahun 2024, realisasi Nilai Indeks Profesionalitas ASN Itjen KKP Tahun 2024 sebesar 90,82 atau 106,84% dari target 85. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, Nilai Indeks Profesionalitas ASN Itjen KKP Tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 0,21 poin dari nilai 90,61 menjadi 90,82.

Tabel 31. Perbandingan Realisasi Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Itjen Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Indikator Kinerja Program	2023			2024		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Itjen	83	90,61	109,17	85	90,82	106,85

Adapun perkembangan Nilai Indeks Profesionalitas ASN Itjen KKP dari tahun ke tahun disajikan pada tabel berikut

Tabel 32. Perkembangan Realisasi Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Itjen Tahun 2020 - 2024

Indikator Kinerja Program	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Itjen	81,76	84,74	85,36	90,61	90,82

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa pada periode Renstra tahun 2020 – 2024 perkembangan capaian Indeks Profesionalitas ASN Itjen KKP menunjukkan trend peningkatan dari tahun ke tahun.

No.	Unit	Tahun 2024		
		Capaian	Target	Prosentase (%)
1	Setjen	87,05	85	102,41
2	Ditjen PKRL	90,86	88	103,25
3	Ditjen Perikanan Tangkap	89,10	84	106,07
4	Ditjen Perikanan Budi Daya	86,80	85	102,11
5	Ditjen Penguatan Daya Saing Produk KP	89,12	87	102,43
6	Ditjen PSDKP	87,25	82	106,40
7	Inspektorat Jenderal	90,82	85	106,84
8	BPPSDMKP	86,23	79	109,15
9	BPPMHKP	88,77	86	103,22
	IPASN KKP	<b>88,44</b> (Tinggi)	<b>85</b> (Tinggi)	104,05

Tabel 33. Nilai Indeks Profesionalitas ASN Unit Eselon I lingkup KKP Tahun 2024

Jika dibandingkan dengan unit Eselon I lingkup KKP, Nilai Indeks Profesionalitas ASN lingkup Itjen berada pada urutan ke-2 terpaut tipis dari Ditjen PKRL yang memiliki Nilai 90,86.

Upaya yang dilaksanakan dalam pencapaian target IKU ini diantaranya adalah dengan meningkatkan kompetensi pegawai melalui pemberian Ijin Belajar dan Tugas Belajar kepada Pegawai, kegiatan Pelatihan dan Pendidikan khususnya bagi pejabat fungsional baru hasil transformasi jabatan, studi banding dengan instansi lain, monitoring dan evaluasi presensi

pegawai, dan lainnya. Kegiatan-kegiatan tersebut akan terus dilaksanakan kedepan dengan memperbaiki beberapa hal yang masih menjadi kekurangan dalam hal profesionalitas ASN Itjen KKP diantaranya dalam hal pemenuhan standar minimal pelatihan pegawai sebanyak 20 Jam Pelatihan per Tahun dan pemenuhan standar kompetensi pegawai pada jabatan fungsional. Terkait hal tersebut, Itjen akan meningkatkan kualitas perencanaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan pegawai pada tahun selanjutnya.

## 12. Unit Kerja Itjen yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar

Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari. Capaian indikator kinerja ini diukur berdasarkan penggunaan aplikasi Portal *Collaboration Office* (<https://portal.kkp.go.id>). Pada tahun 2024, implementasi manajemen pengetahuan melalui aplikasi Portal KKP lingkup Itjen ditargetkan sebesar 94%.

Berdasarkan Nota Dinas Kepala Pusat Data, Statistik, dan Informasi Nomor 31/SJ.7/TU.210/I/2025 perihal Capaian IKU Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup KKP Triwulan IV 2024, realisasi Unit Kerja Itjen yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar sebesar 130,56% atau 138,89% dari target 94%. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, Unit Kerja Itjen yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar lingkup Itjen Tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 22,55 poin dari nilai 108,01 menjadi 130,56. Capaian positif ini didukung oleh peran tim pengelola kinerja lingkup Itjen yang secara berkala melakukan pemantauan terhadap perkembangan tingkat keaktifan unit kerja lingkup Itjen dalam implementasi sistem manajemen pengetahuan melalui aplikasi Portal KKP.

Tabel 34. Perbandingan Unit Kerja Itjen yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Indikator Kinerja Program	2023			2024		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Unit Kerja Itjen yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar	92	108,01	117,40	94	130,56	138,89

Adapun perkembangan Unit Kerja Itjen yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar lingkup Itjen dari tahun ke tahun disajikan pada tabel berikut.

Tabel 35. Perkembangan Realisasi Unit Kerja Itjen yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Tahun 2020 - 2024

Indikator Kinerja Program	2020	2021	2022	2023	2024
Unit Kerja Itjen yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar	100	96,16	97,58	108,01	130,56

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa pada periode Renstra tahun 2020 – 2024 perkembangan capaian Unit Kerja Itjen yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar lingkup Itjen menunjukkan meningkat setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan meningkatnya komitmen unit kerja lingkup Itjen dalam mendukung implementasi Sistem Manajemen Pengetahuan lingkup Itjen.

### 13. Persentase Implementasi Sistem Informasi Pengawasan Lingkup Itjen KKP

Persentase Implementasi Sistem Informasi Pengawasan Lingkup Itjen KKP merupakan sebuah ukuran dari implementasi penggunaan sistem teknologi informasi dalam mendukung pelaksanaan pengawasan oleh unit kerja lingkup Itjen KKP. Penggunaan sistem informasi pengawasan tersebut diukur dari rata-rata jumlah persentase implementasi aplikasi dukungan pengawasan yang terdiri

dari Aplikasi SIMWAS dan Sistem Informasi Data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (SIDAK) yang diukur secara Triwulan dengan target yang sama yaitu sebesar 88%.

Berdasarkan Memorandum Sekretaris Itjen KKP Nomor 36/ITJ.0/TU.140/I/2025, perihal Capaian IKU Persentase Implementasi Sistem Informasi Pengawasan Lingkup Itjen KKP Tahun 2024, diketahui bahwa realisasi Persentase Implementasi Sistem Informasi Pengawasan Lingkup Itjen KKP Tahun 2024 mencapai 100% atau 113,64% dari target 88%. Angka realisasi tersebut sama dengan tahun sebelumnya yang mencapai 100%.

Tabel 36. Perbandingan Persentase Implementasi Sistem Informasi Pengawasan Lingkup Itjen KKP Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Indikator Kinerja Program	2023			2024		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Persentase Implementasi Sistem Informasi Pengawasan Lingkup Itjen KKP	85	100	117,65	88	100	113,64

Adapun perkembangan realisasi Persentase Implementasi Sistem Informasi Pengawasan Lingkup Itjen KKP dari tahun ke tahun disajikan pada tabel berikut.

Tabel 37. Perkembangan Realisasi Persentase Implementasi Sistem Informasi Pengawasan Lingkup Itjen KKP Tahun 2020 - 2024

Indikator Kinerja Program	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Implementasi Sistem Informasi Pengawasan Lingkup Itjen KKP (%)	92,64	96,16	97,58	100	100

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa pada periode Renstra tahun 2020 – 2024 perkembangan capaian Implementasi Sistem Informasi Pengawasan Lingkup Itjen KKP menunjukkan trend positif di mana setiap tahunnya terus mengalami peningkatan dan bertahan pada nilai optimal pada dua tahun terakhir. Perkembangan positif ini didukung oleh komitmen pimpinan dan pegawai lingkup Itjen yang terus menguat dalam mengoptimalkan pemanfaatan sistem informasi dalam mendukung pelaksanaan manajemen pengawasan inter.

#### 14. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Itjen KKP

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah sebuah indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian/Lembaga dari sisi kaulitas perencanaan, kualitas pelaksanaan dan kualitas hasil yang meliputi 8 (delapan) Indikator Pelaksanaan Anggaran yaitu: Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan UP dan TUP, Dispensasi SPM,

dan Capaian *Output*. Pada Tahun 2024, Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Itjen KKP ditargetkan mencapai angka 93,76.

Berdasarkan Nota Dinas Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara Nomor 196/SJ.2/RC.610/I/2025 perihal Penyampaian Capaian Indikator Kinerja Utama Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Semester II Tahun 2024, realisasi Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Itjen KKP Tahun 2024 mencapai 98,34 atau 104,88% dari target 93,76. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, Nilai IKPA Itjen Tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 3,12 poin dari nilai 95,22 menjadi 98,34.

Tabel 38. Perbandingan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Itjen KKP Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Indikator Kinerja Program	2023			2024		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Itjen KKP	93,75	95,22	101,57	93,76	98,34	104,88

Adapun perkembangan Nilai IKPA Itjen dari tahun ke tahun disajikan pada tabel berikut.

Tabel 39. Perkembangan Realisasi Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Itjen KKP Tahun 2020 - 2024

Indikator Kinerja Program	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Itjen KKP (%)	93,01	96,95	95,98	95,22	98,34

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa pada periode Renstra tahun 2020 – 2024 perkembangan Nilai IKPA Lingkup Itjen KKP menunjukkan trend positif di mana setiap tahunnya cenderung mengalami peningkatan. Perkembangan positif ini didukung oleh kegiatan monitoring dan evaluasi atas perkembangan pelaksanaan anggaran lingkup Itjen yang dilaksanakan secara periodik.

## 15. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Itjen KKP

Perencanaan anggaran merupakan fondasi penting dalam pengelolaan keuangan negara. Anggaran yang baik mencerminkan alokasi sumber daya yang efisien dan efektif untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Nilai kinerja perencanaan anggaran (NKPA) menjadi tolok ukur untuk mengevaluasi sejauh mana anggaran tersebut telah disusun dengan baik dan relevan dengan target yang ingin dicapai. NKPA diukur berdasarkan variabel efektivitas dan efisiensi yang meliputi perbandingan realisasi anggaran dengan rencana, capaian *output* dan *outcome* serta capaian Indikator Kinerja.

Indikator kinerja NKPA ini merupakan perubahan dari indikator kinerja Nilai Kinerja Anggaran (NKA) yang dilakukan berdasarkan Nota Dinas PIh. Kepala Biro Perencanaan Nomor: 2526/SJ.1/RC.610/IX/2024 perihal hasil rapat pembahasan tindak lanjut revisi Renstra KKP Tahun 2020 - 2024 dan revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Melalui Nota Dinas tersebut, Biro Perencanaan KKP memberikan arahan agar Indikator Kinerja NKA dengan yang memiliki target 86 diubah menjadi NKPA dengan target 81. Perubahan ini sejalan dengan adanya penyesuaian dalam pedoman pengukuran kualitas pelaksanaan anggaran yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan dengan tujuan untuk mempertajam dan menyederhanakan metode pengukuran yang telah ada sebelumnya. Adapun penyesuaian nilai target dilakukan dengan mempertimbangkan parameter penilaian NKPA yang dinilai lebih berat dalam pemenuhannya.

Berdasarkan Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara Nomor 182/SJ.2/TU.210/I/2025 perihal Capaian Indikator Kinerja Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Triwulan IV TA. 2024, realisasi Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Itjen KKP Tahun 2024 sebesar 90,61 (**kategori sangat baik**) atau 111, 86% dari target 81 sebagaimana disajikan pada Gambar 9 berikut.

No.	Kode UEI	UEI	NK Perencanaan Anggaran	Efektivitas		Efisiensi	
				IKP	CRO	Penggunaan SBK	Efisiensi SBK
1			90.61	100.00	100.00	100.00	37.40

Gambar 9. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Itjen Tahun 2024

Sebagaimana indikator kinerja NKPA mulai diimplementasikan pada akhir tahun 2024 sebagai pengganti indikator kinerja Nilai Kinerja Anggaran (NKA) maka capaian NKPA tahun 2024 belum bisa dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya.

Tabel 40. Perbandingan Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Itjen KKP Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Indikator Kinerja Program	2023			2024		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Itjen KKP	-	-	-	81	90,61	111,86

Upaya yang dilakukan untuk mencapai target Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Itjen KKP diantaranya adalah monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap perkembangan pelaksanaan anggaran, capaian *output*, capaian indikator kinerja, dan realisasi anggaran dengan indeks Standar Biaya Keluaran (SBK).

Adapun perkembangan Nilai Kinerja Anggaran Itjen KKP dari tahun ke tahun disajikan pada tabel berikut.

Tabel 41. Perkembangan Realisasi Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Itjen KKP Tahun 2020 - 2024

Indikator Kinerja Program	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Itjen KKP (Nilai)	95,76 (NKA)	92,01 (NKA)	92,60 (NKA)	90,41 (NKA)	90,61

Catatan : Pada Triwulan IV Tahun 2024 terdapat perubahan Nama dan target Indikator Kinerja semula Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Itjen KKP menjadi Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Itjen KKP

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa pada periode tahun 2020 – 2023 perkembangan capaian Nilai Kinerja Anggaran Itjen KKP menunjukkan angka yang fluktuatif. Secara umum fluktuasi nilai capaian ini dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan terhadap Rencana Penarikan Dana (Dana) dan nilai efisiensi anggaran. Sedangkan pada tahun 2024, indikator kinerja NKA telah diganti dengan NKPA.

## 16. Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Lingkup KKP

Rekomendasi perbaikan kebijakan lingkup KKP adalah rekomendasi yang diberikan oleh Itjen KKP kepada seluruh mitra kerja yang menjadi objek pengawasan untuk melakukan perubahan, penambahan dan/atau penyempurnaan peraturan, kebijakan, maupun sistem dan prosedur administrasi/operasi. Hal ini sejalan dengan kebijakan pengawasan tahun 2024, yaitu selain sebagai penjamin mutu (*Quality Assurance*), Itjen perlu menitikberatkan perannya sebagai konsultan (*Advisory Services*) yang akan memberikan jasa konsultasi serta saran perbaikan dalam proses pelaksanaan program/kegiatan juga pada tataran kebijakan.

Pada tahun 2024, Itjen KKP menargetkan untuk melakukan pengawasan atau kajian terhadap minimal 18 kebijakan/peraturan/prosedur operasi lingkup KKP. Dalam hal ini, pengawasan berupa kajian tersebut ditujukan untuk mendorong penyempurnaan dan penguatan implementasi kebijakan/peraturan/prosedur terkait tata kelola pelaksanaan program/kegiatan pada mitra kerja yang pengukurannya dilakukan secara semesteran dengan target yang sama sebanyak 9 kebijakan/peraturan/prosedur operasi setiap semester.

Berdasarkan hasil pengukuran, Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Lingkup KKP Tahun 2024 terealisasi sebanyak 21 rekomendasi dari target 18 Rekomendasi atau tercapai 116,67%. Secara rinci rekomendasi Perbaikan Kebijakan Lingkup KKP Tahun 2024 disajikan pada Lampiran 6.

Tabel 42. Perbandingan Capaian Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Lingkup KKP Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Indikator Kinerja Program	2023			2024		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Lingkup KKP	18	26	144,44	18	21	167,67

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terjadi penurunan jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan yang disampaikan oleh Itjen kepada mitra pada Tahun 2024. Dalam hal ini dapat disampaikan bahwa jumlah rekomendasi yang dihasilkan oleh Itjen setiap tahun cenderung akan fluktuatif sesuai dengan prioritas isu yang perlu dilakukan kajian. Kondisi ini digambarkan dalam perkembangan capaian rekomendasi perbaikan kebijakan yang dihasilkan oleh Itjen dari tahun 2020 – 2024 sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 43. Perkembangan Capaian Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Itjen KKP Tahun 2020 - 2024

Indikator Kinerja Program	2020	2021	2022	2023	2024
Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Lingkup KKP (Rekomendasi)	22	23	23	26	21

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan yang dihasilkan Itjen cenderung berbeda setiap tahunnya. Namun demikian, sepanjang tahun 2020 – 2024, indikator kinerja ini dapat tercapai melampaui target.

## 17. Persentase Pelaksanaan Penugasan Pengawasan dan Pelaporan Pengawasan yang Memenuhi Standar Mutu Pengawasan Lingkup Itjen KKP

Persentase pelaksanaan penugasan pengawasan dan pelaporan pengawasan yang memenuhi standar pelaksanaan pengawasan lingkup Itjen KKP adalah jumlah penugasan dan pelaporan hasil audit juga evaluasi yang dilaksanakan oleh Itjen KKP terhadap mitra kerja yang memenuhi standar mutu pengawasan berdasarkan tingkat kepatuhan penyampaian dan kualitas formulir Kendali Mutu Pengawasan (KMP). Pada tahun 2024, kegiatan pengawasan yang memenuhi standar mutu pengawasan secara optimal ditargetkan 89% dari seluruh kegiatan pengawasan yang dilaksanakan selama periode satu tahun.



Berdasarkan hasil evaluasi internal Nomor B.38/ITJ.5/TU.210/I/2025 tentang Pelaksanaan Penugasan dan Pelaporan Pengawasan yang Memenuhi Standar Mutu Pengawasan, diketahui bahwa pelaksanaan penugasan pengawasan dan pelaporan hasil pengawasan yang memenuhi standar mutu pengawasan lingkup Itjen KKP Tahun 2024 adalah sebesar 98,50% dari target 89% atau tercapai 110,67%. Rincian hasil evaluasi pelaksanaan penugasan yang memenuhi standar mutu pengawasan lingkup Itjen disajikan pada tabel berikut.

Tabel 44. Realisasi Persentase Pelaksanaan Penugasan Pengawasan dan Pelaporan Pengawasan yang Memenuhi Standar Mutu Pengawasan Lingkup Itjen KKP Tahun 2024

Unit kerja	Semester I (%)	Semester II (%)	Realisasi 2024 (%)	Target (%)	% Capaian
a	b	c	$d = (b+c)/2$	e	f
Inspektorat I	100	100	100	89	112,36
Inspektorat II	96,65	100	98,33	89	110,48
Inspektorat III	95,66	100	97,83	89	109,92
Inspektorat IV	95,66	100	97,83	89	109,92
Inspektorat V	100	100	100	89	112,36
<b>ITJEN</b>	<b>97</b>	<b>100</b>	<b>98,50</b>	<b>89</b>	<b>110,67</b>

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, Persentase Pelaksanaan Penugasan Pengawasan dan Pelaporan Pengawasan yang Memenuhi Standar Mutu Pengawasan Lingkup Itjen Tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 2,51 poin dari nilai 95,99% menjadi 98,50%. Capaian positif ini didukung oleh semakin meningkatnya pemanfaatan sistem informasi dalam pelaksanaan kendali mutu pengawasan lingkup Itjen.

Tabel 45. Perbandingan capaian Persentase Pelaksanaan Penugasan Pengawasan dan Pelaporan Pengawasan yang Memenuhi Standar Mutu Pengawasan Lingkup Itjen KKP Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Indikator Kinerja Program	2023			2024		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Persentase pelaksanaan penugasan pengawasan dan pelaporan pengawasan yang memenuhi standar pelaksanaan pengawasan lingkup Itjen KKP	88	95,99	109,08	89	98,50	110,67

Adapun perkembangan Persentase Pelaksanaan Penugasan Pengawasan dan Pelaporan Pengawasan yang Memenuhi Standar Mutu Pengawasan Lingkup Itjen KKP dari tahun ke tahun disajikan pada tabel berikut.

Tabel 46. Perkembangan Realisasi Persentase Pelaksanaan Penugasan Pengawasan dan Pelaporan Pengawasan yang Memenuhi Standar Mutu Pengawasan Lingkup Itjen KKP Tahun 2020 - 2024

Indikator Kinerja Program	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase pelaksanaan penugasan pengawasan dan pelaporan pengawasan yang memenuhi standar pelaksanaan pengawasan lingkup Itjen KKP (%)	98,09	96,78	98,98	95,99	98,50

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa pada periode Renstra tahun 2020 – 2024 perkembangan capaian Persentase Pelaksanaan Penugasan Pengawasan dan Pelaporan Pengawasan yang Memenuhi Standar Mutu Pengawasan Lingkup Itjen KKP menunjukkan angka yang fluktuatif. Kondisi tersebut sangat dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan aparatur Itjen dalam memenuhi kendali mutu pengawasan dan perkembangan kebijakan pedoman pengawasan intern lingkup Itjen dalam hal kewajiban pemenuhan dokumen Kendali Mutu Pengawasan. Terkait hal ini, Itjen KKP akan terus melakukan perbaikan dan meningkatkan mutu pengawasan, diantaranya melalui optimalisasi penggunaan teknologi informasi dan kegiatan telaah sejawat antar unit Inspektorat. Selain itu, Itjen juga akan terus melakukan evaluasi atas implementasi Kendali Mutu Pengawasan secara periodik yang dikoordinasikan oleh Inspektorat V sebagai upaya untuk menjaga pelaksanaan dan pelaporan pengawasan tetap sesuai dengan standar mutu pengawasan.

#### 18. Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaksanaan PKPT Lingkup Itjen KKP

Persentase Tingkat Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan adalah persentase kesesuaian pelaksanaan penugasan pengawasan terhadap PKPT yang telah ditetapkan. Pada tahun 2024, tingkat kepatuhan pelaksanaan PKPT ditargetkan sebesar 80% dari seluruh kegiatan pengawasan yang dilaksanakan selama periode satu tahun.

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Internal Nomor B.38/ITJ.5/TU.210/I/2025, diketahui bahwa Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaksanaan PKPT Lingkup Itjen KKP Tahun 2024 mencapai 99,34% dari target 80% atau tercapai 123,35%. Secara rinci Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaksanaan PKPT Lingkup Itjen KKP Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 47. Hasil Evaluasi Tingkat Kepatuhan Pelaksanaan PKPT Itjen KKP Tahun 2024

Unit kerja	Semester I (%)	Semester II (%)	Realisasi 2024 (%)	Target (%)	% Capaian
a	b	c	$d = (b+c)/2$	e	f
Inspektorat I	100	100	100	80	125,00
Inspektorat II	100	100	100,00	80	125,00
Inspektorat III	100	100	100	80	125,00
Inspektorat IV	94,92	100	97,46	80	121,83
Inspektorat V	97,83	100	98,92	80	123,64
<b>ITJEN</b>	<b>98,68</b>	<b>100</b>	<b>99,34</b>	<b>80</b>	<b>124,18</b>

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaksanaan PKPT Lingkup Itjen KKP Tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 2,09 poin dari 97,25% menjadi 99,34%. Capaian positif ini didukung oleh pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PKPT yang dilaksanakan

secara berkala setiap triwulan dan revisi yang dilakukan dalam rangka penyesuaian prioritas pengawasan.

Tabel 48. Perbandingan Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaksanaan PKPT Lingkup Itjen Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Indikator Kinerja Program	2023			2024		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaksanaan PKPT Lingkup Itjen	80	97,25	121,56	80	99,34	124,18

Adapun perkembangan Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaksanaan PKPT Lingkup Itjen KKP dari tahun ke tahun disajikan pada tabel berikut.

Tabel 49. Perkembangan Realisasi Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaksanaan PKPT Lingkup Itjen KKP Tahun 2020 - 2024

Indikator Kinerja Program	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaksanaan PKPT Lingkup Itjen KKP	95,90	88,34	98,61	97,25	99,34

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa pada periode Renstra tahun 2020 – 2024 perkembangan capaian Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaksanaan PKPT Lingkup Itjen KKP menunjukkan angka yang fluktuatif. Kondisi tersebut sangat dipengaruhi oleh perubahan prioritas pengawasan yang seringkali perlu dilakukan terkait adanya direktif pimpinan maupun perkembangan kondisi eksternal setiap tahun. Upaya yang dilakukan dalam rangka pencapaian target Tingkat Kepatuhan Pelaksanaan PKPT Itjen diantaranya adalah dengan melakukan kegiatan monitoring atas kepatuhan PKPT secara periodik di masing-masing Inspektorat lingkup Itjen.

## 19. Indeks Persepsi Pegawai KKP terhadap Kinerja Pengawasan Itjen KKP

Indeks persepsi pegawai KKP terhadap kinerja pengawasan Itjen KKP adalah suatu penilaian/persepsi pegawai lingkup KKP terhadap pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Itjen pada suatu unit kerja yang menjadi objek pengawasan. Indeks persepsi pegawai KKP diperoleh dari kegiatan survei dengan perangkat kuesioner yang berisi parameter untuk mengukur tingkat kepuasan pegawai KKP terhadap pelaksanaan pengawasan Itjen KKP. Pada Tahun 2024, Indeks Persepsi Pegawai KKP terhadap kinerja pengawasan Itjen ditargetkan berada pada angka 4,16 (skala likert 1-5).

Berdasarkan Laporan Hasil Survei Indeks Persepsi Pegawai KKP Semester II Tahun 2024, diperoleh hasil bahwa kegiatan ini dilaksanakan pada 55 satker pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup KKP dengan jumlah sebanyak

793 responden dengan realisasi 4,37 (sangat puas) dari target 4,16 atau tercapai 105,05%. Secara rinci satker Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang menjadi responden disajikan pada Lampiran 7.

Tabel 50. Perbandingan Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Lingkup KKP Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Indikator Kinerja Program	2023			2024		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Indeks Persepsi Pegawai KKP terhadap Kinerja Pengawasan Itjen KKP	4,15	4,29	144,44	4,16	4,37	105,05

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, Indeks Persepsi Pegawai KKP terhadap kinerja pengawasan Itjen Tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 0,08 poin dari 4,29 menjadi 4,37. Capaian positif ini didukung oleh beberapa aktivitas kunci diantaranya, penguatan kapabilitas aparatur Itjen, layanan konsultansi, dan publikasi kegiatan serta kinerja pengawasan Itjen.

Adapun perkembangan Indeks Persepsi Pegawai KKP terhadap kinerja pengawasan Itjen dari tahun ke tahun disajikan pada tabel berikut.

Tabel 51. Perkembangan Realisasi Indeks Persepsi Pegawai KKP terhadap Kinerja Pengawasan Itjen KKP Tahun 2020 - 2024

Indikator Kinerja Program	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Persepsi Pegawai KKP terhadap Kinerja Pengawasan Itjen KKP (Indeks)	4,22	4,36	4,36	4,29	4,37

Berdasarkan tabel di atas dapat terlihat bahwa pada periode tahun 2020 – 2024, perkembangan capaian Indeks Persepsi Pegawai KKP terhadap kinerja pengawasan Itjen cenderung meningkat setiap tahunnya. Capaian positif ini didukung oleh beberapa aktivitas kunci, antara lain:

1. Peningkatkan kualitas pengawasan dan profesionalitas yang dilaksanakan oleh Itjen KKP dengan lebih mendorong kegiatan *advisory services*.
2. Melaksanakan internalisasi kode etik dan standar mutu pengawasan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan dan hasil pengawasan.
3. Melakukan pemantauan kesesuaian pelaksanaan kegiatan pengawasan dengan standar dan kode etik yang berlaku.
4. Meningkatkan kapabilitas aparatur pengawasan sehingga mampu menjawab tantangan dan kondisi terkini dalam pelaksanaan tugasnya.

### C. REALISASI RENCANA AKSI

Untuk mencapai sasaran kinerja yang diharapkan, perlu adanya rencana kegiatan yang disusun menjadi sebuah rencana aksi pencapaian IKU, dimana dalam rencana aksi tersebut disajikan jenis kegiatan pendukung IKU dan

rencana waktu pelaksanaannya. Selanjutnya rencana aksi tersebut dipantau perkembangannya dan dievaluasi secara periodik, setidaknya triwulanan sebagai bentuk pengendalian agar pelaksanaan kegiatan dan sasaran kinerja dapat tercapai sesuai dengan yang telah ditetapkan. Realisasi rencana aksi pencapaian indikator kinerja Itjen KKP Tahun 2024 disajikan pada Lampiran 5.

Berdasarkan pemantauan, rencana aksi pencapaian indikator kinerja Itjen KKP Tahun 2024 sebesar 635 kegiatan dengan target 604 kegiatan atau dengan capaian sebesar 105,13%. Hal ini terkait jumlah satker yang dilakukan Survei Indeks Persepsi Pegawai KKP terhadap Kinerja Pengawasan Itjen KKP semakin banyak dari target s.d Triwulan IV sebanyak 24 satker telah terealisasi sebanyak 55 satker dan realisasi Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Lingkup KKP Tahun 2024 dari target sebanyak 18 Rekomendasi dengan realisasi 21 Rekomendasi. Tidak ditemukan kendala berarti yang dapat menghambat pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dalam rencana aksi pencapaian target kinerja Itjen KKP Tahun 2024.

#### D. ANALISIS PENGELOLAAN SUMBER DAYA ANGGARAN

##### 1. Realisasi Anggaran

Pada Tahun 2024, Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur KKP dilaksanakan dengan menggunakan sumber daya anggaran sebesar Rp84.491.223.040,00 atau 97,35% dari pagu anggaran sebesar Rp86.789.911.000,00 (termasuk anggaran diblokir sebesar Rp2.293.710.000,00). Adapun realisasi anggaran pada pagu efektif mencapai 99,99% dari anggaran Rp84.496.201.000,00 (di luar anggaran terblokir). Rincian realisasi anggaran per jenis belanja disajikan pada tabel berikut.

Tabel 52. Realisasi Anggaran Itjen Tahun 2024 (Jenis Belanja)\* dengan Pagu Blokir

No.	Nama Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Blokir** (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)
1	Belanja Pegawai	36.583.468.000	36.582.932.418	99,999	0	535.582
2	Belanja Barang	47.498.733.000	45.200.583.447	95,162	2.293.710.000	4.439.553
3	Belanja Modal	2.707.710.000	2.707.707.175	100,000	0	2.825
	Jumlah	86.789.911.000	84.491.223.040	97,351	2.293.710.000	4.977.960

Keterangan:

\* Sumber Aplikasi OMSPAN

\*\* Kebijakan *Automatic Adjustment* dan Penghematan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Anggaran Itjen

Dalam pelaksanaannya, realisasi anggaran tersebut digunakan untuk mendukung enam kegiatan utama yang dilaksanakan oleh unit kerja lingkup Itjen dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 53. Realisasi Anggaran Kegiatan Unit Kerja Lingkup Itjen Tahun 2024

No	Unit Kerja/Kegiatan	Pagu Revisi (Rp)	Blokir AA dan Penghematan (Rp)	Pagu Efektif (Rp)	Realisasi	
					Rp	%
1	<b>Inspektorat I</b> Pengawasan Akuntabilitas Aparatur pada Unit Kerja Mitra Inspektorat I dan Pelaksana Pembangunan KP	6.292.347.000	491.125.000	5.801.222.000	5.801.067.065	99,99733
2	<b>Inspektorat II</b> Pengawasan Akuntabilitas Aparatur pada Unit Kerja Mitra Inspektorat II dan Pelaksana Pembangunan KP	6.505.451.000	274.654.000	6.230.797.000	6.230.790.211	99,99989
3	<b>Inspektorat III</b> Pengawasan Akuntabilitas Aparatur pada Unit Kerja Mitra Inspektorat III dan Pelaksana Pembangunan KP	6.625.982.000	279.335.000	6.346.647.000	6.346.645.972	99,99998
4	<b>Inspektorat IV</b> Pengawasan Akuntabilitas Aparatur pada Unit Kerja Mitra Inspektorat IV dan Pelaksana Pembangunan KP	6.133.891.000	489.126.000	5.644.765.000	5.644.756.906	99,99986
5	<b>Inspektorat V</b> Pengawasan Akuntabilitas Aparatur Dengan Tujuan Tertentu pada Pelaksana Pembangunan KP dan Pengawasan pada unit kerja Mitra Inspektorat V	6.036.746.000	462.614.000	5.574.132.000	5.573.682.021	99,99193
6	<b>Sekretariat Itjen</b> Dukungan Manajemen Internal Itjen KKP	55.195.494.000	296.856.000	54.898.638.000	54.894.280.865	99,99206
<b>TOTAL</b>		<b>86.789.911.000</b>	<b>2.293.710.000</b>	<b>84.496.201.000</b>	<b>75.393.908.501</b>	<b>99,99411</b>

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa realisasi anggaran kegiatan dari seluruh unit kerja lingkup Itjen telah optimal dengan tingkat realisasi masing-masing unit di atas 99,90% sehingga secara keseluruhan realisasi anggaran Itjen mencapai 99,99%. Jika dibandingkan dengan realisasi anggaran sebelumnya, capaian realisasi anggaran tahun 2024 lebih tinggi dari tahun 2023 yang mencapai 99,64%. Secara rinci perkembangan realisasi anggaran Itjen selama 10 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 54. Perkembangan Realisasi Anggaran Itjen KKP TA 2015 - 2024

Tahun	Pagu (Rp)	Realisasi	
		Nilai (Rp)	%
2015	75.156.000.000	74.442.423.836	99,05
2016	67.037.176.000	65.688.456.302	97,99
2017	66.602.118.000	63.699.456.301	95,99
2018	79.016.175.000	77.448.439.098	98,02
2019	76.446.563.000	75.921.421.789	99,31
2020	68.784.539.000	65.520.750.972	95,26
2021	66.667.955.000	66.645.148.492	99,97
2022	73.801.484.000	73.660.635.345	99,81
2023	75.666.386.000	75,393,908,501	99,64
2024	84.496.201.000*	84.491.223.040	99,99

Keterangan:

\* Pagu Efektif (Pasca Blokir)

Selanjutnya, dapat diinformasikan bahwa capaian kinerja dan anggaran yang baik tersebut juga diikuti dengan capaian *output* yang optimal. Dengan realisasi anggaran sebesar 99,99% dari pagu yang dialokasikan, seluruh *output* kegiatan Pengawasan Akuntabilitas Aparatur dan Pelaksana Pembangunan KP dan Dukungan Manajemen Internal Lingkup Inspektorat Jenderal dapat tercapai 100% atau sesuai target yang ditetapkan. Rincian capaian *output* kegiatan Itjen KKP Tahun 2024 disampaikan pada tabel berikut.

Tabel 55. Realisasi *Output* Kegiatan Itjen KKP Tahun 2024

No	Kegiatan/Klasifikasi Rincian Output/ Rincian Output	Target	Realisasi	%
<b>A. Pengawasan Akuntabilitas Aparatur dan Pelaksana Pembangunan KP</b>				
KRO 1	Layanan Manajemen Kinerja Internal	12 Dokumen	12 Dokumen	100
	a. Layanan Perencanaan dan Penganggaran	4 Dokumen	4 Dokumen	100
	b. Layanan Pemantauan dan Evaluasi	3 Dokumen	3 Dokumen	100
	c. Layanan Manajemen Keuangan	1 Dokumen	1 Dokumen	100
	d. Layanan Reformasi Kinerja	1 Dokumen	1 Dokumen	100
	e. Layanan Audit Internal	394 Dokumen	394 Dokumen	100
	f. Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	1 Dokumen	1 Dokumen	100
<b>B. Dukungan Manajemen Internal Lingkup Inspektorat Jenderal</b>				
KRO 2	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	25 Unit	25 Unit	100
	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	25 Unit	25 Unit	100
KRO 3	Layanan Dukungan Manajemen Internal	6 Layanan	6 Layanan	100
	a. Layanan BMN	1 Layanan	1 Layanan	100
	b. Layanan Hukum	1 Layanan	1 Layanan	100
	c. Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1 Layanan	1 Layanan	100
	d. Layanan Umum	1 Layanan	1 Layanan	100
	e. Layanan Data dan Informasi	1 Layanan	1 Layanan	100
	f. Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	100
KRO 4	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	37 Unit	37 Unit	100
	Layanan Sarana Internal	37 Unit	37 Unit	100
KRO 5	Layanan Manajemen SDM Internal	428 Orang	428 Orang	100
	a. Layanan Manajemen SDM	214 Orang	214 Orang	100
	b. Layanan Pendidikan dan Pelatihan	214 Orang	214 Orang	100

## 2. Realisasi Anggaran Sasaran Program

Sebagaimana dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, upaya untuk mewujudkan tujuan Itjen selaku pengawas intern KKP pada tahun 2024 dilaksanakan melalui pencapaian 2 (dua) Sasaran Program yang diukur keberhasilannya dengan 19 indikator kinerja. Sebagai implementasi kinerja berbasis anggaran, maka anggaran operasional Itjen dirancang untuk mencapai target seluruh indikator kinerja yang telah ditetapkan sebagai parameter tercapainya sasaran program dan tujuan. Informasi keuangan terkait dengan pencapaian Sasaran Program Itjen tahun 2024 disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 56. Pagu dan Realisasi Anggaran per Sasaran Program Itjen KKP Tahun 2024

Sasaran Program	Pagu Efektif (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah Lingkup KKP	36.094.122.000	36.091.811.611	99,99
Tata Kelola Pengawasan Intern yang Akuntabel dan Efektif	48.402.079.000	48.339.530.879	99,99
<b>Total</b>	<b>84.496.201.000</b>	<b>84.491.342.540</b>	<b>99,99</b>

Dari tabel di atas diketahui bahwa pagu efektif anggaran program Itjen tahun 2024 dialokasikan untuk mencapai dua sasaran program yang terdiri dari “Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah Lingkup KKP” dengan realisasi anggaran mencapai Rp36.091.811.611 atau 99,99% dari pagu Rp36.094.122.000 dan “Tata Kelola Pengawasan Intern yang Akuntabel dan Efektif” dengan realisasi anggaran mencapai Rp48.339.530.879 atau 99,99% dari pagu 48.402.079.000. Realisasi anggaran ini digunakan untuk mendukung pelaksanaan berbagai kegiatan pengawasan dan dukungan manajemen, antara lain:

- a. Pengawasan akuntabilitas keuangan dan kinerja KKP;
- b. Pengawasan implementasi *Three Lines of Defense* dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan KKP;
- c. Pengawasan percepatan pembangunan budaya integritas dan penerapan program anti korupsi di lingkungan KKP;
- d. Pengawasan akuntabilitas penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa di lingkungan KKP;
- e. Pengawasan implementasi manajemen risiko di lingkungan KKP;
- f. Pengawasan tindak lanjut rekomendasi atas temuan BPK RI dan Itjen KKP;
- g. Pengawasan implementasi pelayanan publik di lingkungan KKP;
- h. Pengawasan efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas dan bantuan pemerintah yang dilaksanakan oleh KKP;
- i. Pengawasan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Program *Blue Economy*.
- j. Pengawasan percepatan reformasi birokrasi KKP; dan
- k. Dukungan manajemen pengawasan dan peningkatan kapabilitas Itjen KKP.



### 3. Analisis Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Penilaian tingkat kualitas pelaksanaan anggaran tidak cukup dilihat dari tingkat realisasi keuangan saja, namun juga perlu dilihat dari seberapa besar nilai manfaat yang dihasilkan dari penggunaan anggaran tersebut. Dalam hal ini, Itjen KKP sebagai organisasi sektor publik dituntut untuk memperhatikan *value for money* dalam menjalankan aktifitasnya. *Value for money* merupakan salah satu indikator kinerja yang memberikan informasi apakah anggaran (dana) yang dibelanjakan menghasilkan suatu nilai tertentu bagi para pemangku kepentingan (*stakeholders*), indikator yang dimaksud adalah ekonomis, efisien, dan efektif. Pada proses pengukuran, indikator efektivitas dalam *Value for money* berorientasi pada hasil dan lebih bersifat kualitatif, sedangkan indikator ekonomis dan efisien lebih berorientasi pada proses dan lebih bersifat kuantitatif.

Kriteria yang digunakan untuk mengukur *value for money* Itjen KKP antara lain:

- a. Ekonomis: pemerolehan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah. Ekonomis terkait dengan sejauh mana Itjen KKP dapat meminimalisir sumber daya anggaran yang digunakan, yaitu dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif.
- b. Efektivitas: tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan.
- c. Efisiensi: pencapaian output yang optimal dengan penggunaan sumber daya anggaran seminimal mungkin. Dengan kata lain, efisiensi merupakan perbandingan antara realisasi *output* dengan input (anggaran) yang dikaitkan dengan target yang telah ditetapkan.

Dengan mengacu pada kriteria di atas, dapat disampaikan bahwa anggaran yang dialokasikan untuk mendukung tugas dan fungsi Itjen telah dikelola dengan ekonomis, efektif dan efisien dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Ekonomis

Pengelolaan anggaran Itjen telah dilaksanakan secara ekonomis mulai dari tahap perencanaan. Penyusunan anggaran dilaksanakan dengan mengacu kepada sasaran dan target kinerja Itjen yang dirumuskan untuk menjawab kebutuhan KKP, mitra kerja, dan internal Itjen. Dalam prosesnya, penyusunan anggaran Itjen juga telah melalui proses review yang dilaksanakan oleh auditor internal yang ditugaskan untuk memastikan rancangan anggaran telah sesuai dengan sasaran dan

target kinerja, ketentuan yang berlaku, dan ekonomis. Selain itu, dalam penyusunan rencana kegiatan pengawasan, Itjen menggunakan pendekatan pengawasan berbasis risiko sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi Itjen menjadi lebih fokus dan tepat sasaran. Selanjutnya, dalam tahap pelaksanaan, pengelolaan anggaran Itjen diawasi secara berkala oleh auditor internal untuk memastikan organisasi mendapatkan barang, jasa, dan SDM kualitas terbaik dengan biaya sekecil mungkin.

b. Efektif

Berdasarkan pengukuran kinerja tahun 2024, diketahui bahwa dari 19 Indikator Kinerja Program yang ditetapkan sebagai ukuran keberhasilan program, seluruhnya dapat tercapai melebihi target yang ditetapkan. Dengan capaian indikator kinerja tersebut, nilai rata-rata pencapaian sasaran dan target kinerja Itjen tahun 2024 yang ditunjukkan dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) mencapai 110,05% atau diatas target yang diharapkan. Dengan membandingkan tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan pada tahun 2024, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan pelaksanaan anggaran program pengawasan intern KKP terkelola dengan efektif. Tercapainya tingkat efektivitas kinerja tersebut tidak lepas dari adanya pengendalian proses pencapaian target kinerja yang dilaksanakan secara sistematis dan periodik oleh pimpinan beserta tim pengelola kinerja Itjen.

c. Efisien

Tingkat efisiensi atas pelaksanaan anggaran program pengawasan Itjen tahun 2024 dapat dilihat dari hasil perbandingan antara realisasi anggaran dengan capaian kinerja yang meliputi capaian *output* dan capaian kinerja organisasi (Skor Kinerja/NKO). Secara keseluruhan, pengelolaan anggaran Itjen dalam mendukung pencapaian kinerja tahun 2024 dapat dinilai efisien karena dengan dengan *input* anggaran yang lebih kecil (99,99%) dapat dihasilkan kinerja yang sesuai dan melebihi target (100%). Rincian efisiensi anggaran per jenis capaian kinerja disampaikan sebagai berikut.

1) Efisiensi Capaian Kinerja *Output*

Berdasarkan perbandingan antara realisasi anggaran dengan *output* yang dihasilkan, diketahui bahwa realisasi anggaran tahun 2024 sebesar 99,99% sedangkan capaian *output* dari masing-

masing kegiatan mencapai 100% sehingga terdapat efisiensi sebesar 0,01% dalam menghasilkan *output* dengan optimal.

2) Efisiensi Capaian Kinerja Organisasi

Berdasarkan perbandingan dengan Skor Kinerja (NKO) sampai dengan Triwulan IV yang merupakan rata-rata capaian kinerja organisasi tahun 2024, diketahui bahwa sumber daya anggaran Itjen digunakan secara efisien karena dengan *input* anggaran yang lebih kecil (99,99%) dapat menghasilkan kinerja yang melebihi target (Skor Kinerja 110,14%). Dengan demikian, efisiensi anggaran atas pencapaian kinerja organisasi secara keseluruhan (Skor Kinerja) sebesar 10,15%.

Secara rinci efisiensi anggaran Itjen KKP Tahun 2024 per jenis capaian kinerja disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 57. Efisiensi Anggaran Itjen KKP Tahun 2024 per Jenis Capaian Kinerja

Realisasi Anggaran ( <i>Input</i> )	Realisasi Hasil/Kinerja		Efisiensi
99,99%	<i>Output</i>	100%	0,01%
Dari alokasi anggaran Rp84.491.342.540	Nilai Kinerja Organisasi (NKO)	110,14%	10,15%

Pencapaian efisiensi anggaran sebagaimana disajikan pada tabel di atas merupakan hasil dari optimalisasi hari pengawasan melalui penggabungan beberapa subjek pengawasan (yang memungkinkan) dalam satu kali perjalanan dinas. Selain hal tersebut, tercapainya efisiensi juga dipengaruhi oleh pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan pengawasan dan penerapan pengawasan berbasis risiko yang memungkinkan pengawasan Itjen lebih tepat sasaran.

## BAB 4 PENUTUP

### A. KESIMPULAN

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari hasil pengukuran dan evaluasi kinerja Itjen KKP Tahun 2024 antara lain :

1. Berdasarkan aplikasi pengelolaan kinerja KKP (*kinerjaku.kkp.go.id*) Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Itjen KKP Tahun 2024 sebesar **110,14 (berpredikat “Istimewa”)**. Hal ini menunjukkan upaya pencapaian target kinerja yang dilakukan Itjen pada Tahun 2024 telah optimal.
2. Berdasarkan hasil pengukuran, dari 19 (lima) Indikator Kinerja yang diukur, seluruh indikator kinerja Itjen dapat tercapai melebihi target yang telah ditetapkan (capaian >100%), dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan KKP sebesar 0,09 dari target  $\leq 0,5\%$  atau dengan capaian 181,07% (nilai maksimal 120% pada aplikasi kinerjaku).
  - b. Nilai Maturitas SPIP KKP sebesar 3,68 dari target 3,3 atau dengan capaian 111,52%.
  - c. Unit Kerja KKP Berpredikat Menuju WBK sampai dengan Tahun 2024 tercapai sebanyak 109 unit kerja atau 103,81% dari target 105 unit kerja.
  - d. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP KKP sebesar 86,11 dengan predikat penilaian memuaskan (A) dari target 84 (A) atau tercapai 102,51%.
  - e. Nilai Integritas KKP mencapai nilai 80,31 dari target 78 atau tercapai sebesar 101,53%.
  - f. Tingkat Efektifitas Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis Lingkup KKP mencapai 88,61% atau 108,06% dari target 82%.
  - g. Tingkat Efektifitas Pengawasan BMN Lingkup KKP Tahun 2024 mencapai 94,39% atau 115,11% dari target 82%.
  - h. Tingkat Efektifitas Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup KKP mencapai 90,39% atau 110,89% dari target 82%.
  - i. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Unit Eselon I Lingkup KKP mencapai 94,02% atau 115,11% dari target 80%.
  - j. Tingkat Kapabilitas Itjen KKP mencapai nilai 3,70 atau 105,71% dari target nilai 3,5.

- k. Indeks Profesionalitas ASN Itjen KKP mencapai 90,82 atau 106,85% dari target 85.
  - l. Unit Kerja Itjen yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar mencapai 130,56% atau 138,89% dari target 94% (nilai maksimal 120% pada aplikasi kinerjaku)
  - m. Persentase Implementasi Sistem Informasi Pengawasan Lingkup Itjen KKP mencapai 100% atau 113,64% dari target 88%.
  - n. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Itjen KKP sebesar 98,34 atau 104,88% dari target 93,76.
  - o. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Itjen KKP sebesar 90,61 dari target 81 atau dengan capaian 111,86%
  - p. Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Lingkup KKP sebanyak 21 Rekomendasi dari target 18 Rekomendasi atau tercapai 116,67%.
  - q. Persentase pelaksanaan penugasan pengawasan dan pelaporan hasil pengawasan yang memenuhi standar pelaksanaan pengawasan lingkup Itjen KKP Tahun 2024 tercapai 98,50% atau 110,67% dari target 89%.
  - r. Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaksanaan PKPT Lingkup Itjen KKP mencapai 99,34% dari target 80% atau tercapai 124,17% (nilai maksimal 120% pada aplikasi kinerjaku).
  - s. Indeks Persepsi Pegawai KKP terhadap Kinerja Pengawasan Itjen KKP KKP mencapai 4,37 atau 105,05% dari target 4,16.
3. Realisasi anggaran Itjen Tahun 2024 tercapai dengan optimal dengan uraian sebagai berikut:
- a. Realisasi anggaran Itjen KKP berdasarkan aplikasi OMSPAN per 31 Desember 2024 sebesar Rp84.491.223.040,00 atau 97,35% dari pagu anggaran sebesar Rp86.789.911.000,00 (termasuk anggaran diblokir sebesar Rp2.293.710.000,00). Adapun realisasi anggaran pada pagu efektif mencapai 99,99% dari anggaran Rp84.496.201.000,00 (di luar anggaran terblokir).
  - b. Dengan realisasi anggaran tersebut, seluruh *output* kegiatan dapat tercapai sesuai dengan target (100%) dan nilai rata-rata capaian kinerja organisasi mencapai 110,14. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya anggaran Itjen cukup efisien karena dengan penggunaan anggaran yang lebih kecil/sedikit dapat menghasilkan capaian *output* dan target kinerja yang lebih tinggi.

## B. PERMASALAHAN

Secara umum, tidak ditemukan kendala berarti dalam pencapaian target kinerja Itjen Tahun 2024, hal ini ditunjukkan dengan tingkat realisasi seluruh indikator kinerja dapat melampaui target yang telah ditetapkan. Namun demikian, untuk menjaga kualitas pencapaian target kinerja ke depan, diperlukan penguatan pengendalian dan perbaikan secara berkelanjutan dalam hal:

1. Pedoman teknis pelaksanaan pengawasan
2. Program kerja dan rencana kinerja pengawasan dengan menyesuaikan arah kebijakan nasional dan KKP
3. Pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi SDM lingkup Itjen melalui kegiatan pelatihan internal
4. Pemanfaatan sistem informasi dalam mendukung pelaksanaan pengawasan.

## C. LANGKAH PERBAIKAN (REKOMENDASI)

Terhadap beberapa hal yang memerlukan penguatan pengendalian dan perbaikan berkelanjutan sebagaimana disampaikan di atas, perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Meriviu pedoman/petunjuk teknis dan tata laksana pengawasan intern untuk kemudian dilakukan perbaikan dalam rangka menyesuaikan perkembangan kondisi dan kebutuhan manajemen pengawasan intern lingkup KKP;
2. Menyusun program kerja pengawasan Itjen dengan fokus pada pengawalan program prioritas nasional dan KKP dengan menyesuaikan ketersediaan sumber daya anggaran dan SDM;
3. Menyelenggarakan kegiatan pelatihan internal dengan memanfaatkan teknologi informasi/media dari (*online*);
4. Menyusun *roadmap* pengembangan sistem informasi pengawasan sebagai pedoman dalam menyusun rencana kerja/strategi pengembangan sistem informasi pengawasan lingkup Itjen.

# LAMPIRAN

## Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Itjen KKP Tahun 2024

  
**KEMENTERIAN  
KELAUTAN DAN PERIKANAN**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
INSPEKTORAT JENDERAL**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Tornanda Syaifullah**  
Jabatan : Inspektur Jenderal

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Sakti Wahyu Trenggono**  
Jabatan : Menteri Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Denpasar, 7 Desember 2023

<p>Pihak Kedua Menteri Kelautan dan Perikanan</p>  <b>Sakti Wahyu Trenggono</b>	<p>Pihak Pertama Inspektur Jenderal</p>  <b>Tornanda Syaifullah</b>
---	---



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
INSPEKTORAT JENDERAL**

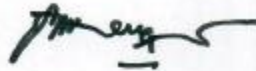
SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET
Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Bemilai Tambah lingkup KKP	1	Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan KKP (%)	≤0,5
	2	Nilai Maturitas SPIP KKP (nilai)	3,3
	3	Unit Kerja KKP Berpredikat Menuju WBK (unit kerja)	106
	4	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP KKP (Nilai)	84 (A)
	5	Nilai Survei Integritas KKP (Nilai)	80,5
	6	Tingkat Efektifitas Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis Lingkup KKP (%)	82
	7	Tingkat Efektifitas Pengawasan Pengelolaan BMN Lingkup KKP (%)	82
	8	Tingkat Efektifitas Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup KKP (%)	82
	9	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup KKP (%)	80
Tata Kelola Pengawasan Intern yang Akuntabel dan Efektif	10	Tingkat Kapabilitas Itjen KKP (Nilai)	3,5
	11	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Itjen KKP (Indeks)	85
	12	Unit Kerja Itjen yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)	94
	13	Persentase Implementasi Sistem Informasi Pengawasan Lingkup Itjen KKP (%)	88
	14	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Itjen KKP (Nilai)	93,76
	15	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Itjen KKP	86
	16	Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Lingkup KKP (rekomendasi)	18
	17	Persentase Pelaksanaan Penugasan dan Pelaporan Pengawasan yang Memenuhi Standard Mutu Pengawasan Lingkup Itjen KKP (%)	89
	18	Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaksanaan PKPT Lingkup Itjen KKP (%)	80
	19	Indeks Persepsi Pegawai KKP Terhadap Kinerja Pengawasan Itjen (Indeks)	4,16

**Data Anggaran :**

No	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
<b>Program Dukungan Manajemen</b>		
1.	Kegiatan Pengawasan Akuntabilitas Aparatur dan Pelaksana Pembangunan Kelautan dan Perikanan	38.387.832.000
2.	Kegiatan Dukungan Manajemen Internal Lingkup Inspektorat Jenderal	48.866.511.000
<b>Total Anggaran Inspektorat Jenderal Tahun 2024</b>		<b>87.254.343.000</b>

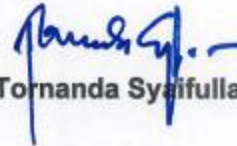
Denpasar, 7 Desember 2023

Pihak Kedua  
Menteri Kelautan dan Perikanan



**Sakti Wahyu Trenggono**

Pihak Pertama  
Inspektur Jenderal



**Tornanda Syaifullah**

Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Itjen KKP Tahun 2024 (Revisi)



KEMENTERIAN  
KELAUTAN DAN PERIKANAN

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
INSPEKTORAT JENDERAL**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tornanda Syaifullah  
Jabatan : Inspektur Jenderal

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Sakti Wahyu Trenggono  
Jabatan : Menteri Kelautan dan Perikanan


Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 9 Oktober 2024

**Pihak Kedua  
Menteri Kelautan dan Perikanan**

  
Sakti Wahyu Trenggono

**Pihak Pertama  
Inspektur Jenderal**

  
Tornanda Syaifullah

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
INSPEKTORAT JENDERAL**

<b>SASARAN PROGRAM</b>	<b>INDIKATOR KINERJA PROGRAM</b>		<b>TARGET</b>
Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Bermilai Tambah lingkup KKP	1	Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan KKP (%)	≤0,5
	2	Tingkat Maturitas SPIP KKP (Nilai)	3,3
	3	Unit Kerja KKP Berpredikat Menuju WBK (unit)	105
	4	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP KKP (Nilai)	84 (A)
	5	Nilai Survei Integritas KKP (Nilai)	78
	6	Tingkat Efektifitas Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis Lingkup KKP (%)	82
	7	Tingkat Efektifitas Pengawasan Pengelolaan BMN Lingkup KKP (%)	82
	8	Tingkat Efektifitas Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup KKP (%)	82
	9	Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup KKP (%)	80
Tata Kelola Pengawasan Intern yang Akuntabel dan Efektif	10	Tingkat Kapabilitas Itjen KKP (Nilai)	3,5
	11	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Itjen KKP (Indeks)	85
	12	Unit Kerja Itjen yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)	94
	13	Persentase Implementasi Sistem Informasi Pengawasan Lingkup Itjen KKP (%)	88
	14	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Itjen KKP (Nilai)	93,76
	15	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Itjen KKP (Nilai)	81
	16	Jumlah Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Lingkup KKP (rekomendasi)	18
	17	Persentase Pelaksanaan Penugasan dan Pelaporan Pengawasan yang Memenuhi Standard Mutu Pengawasan Lingkup Itjen KKP (%)	89
	18	Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaksanaan PKPT Lingkup Itjen KKP (%)	80
	19	Indeks Persepsi Pegawai KKP Terhadap Kinerja Pengawasan Itjen (Indeks)	4,16

### DATA ANGGARAN

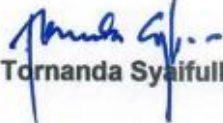
No	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
<b>Program Dukungan Manajemen</b>		
1.	Kegiatan Pengawasan Akuntabilitas Aparatur dan Pelaksana Pembangunan Kelautan dan Perikanan	38.387.832.000
2.	Kegiatan Dukungan Manajemen Internal Lingkup Inspektorat Jenderal	48.866.511.000
<b>Total Anggaran Inspektorat Jenderal tahun 2024</b>		<b>87.254.343.000</b>

Jakarta, 7 Oktober 2024

**Pihak Kedua**  
**Menteri Kelautan dan Perikanan**

  
/ Sakti Wahyu Trenggono

**Pihak Pertama**  
**Inspektur Jenderal**

  
Tornanda Syaifullah

Lampiran 3. Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK/WBBM Lingkup KKP s.d Tahun 2024

No.	Unit Kerja	Unit Eselon I	Tahun Berpredikat WBK	Tahun WBK/WBBM MenPANRB
1	BBKIPM Jakarta I	BPPMHKP	2022	
2	BBKIPM Makassar	BPPMHKP		2019 Stranas Kawasan
3	BKIPM Ambon	BPPMHKP	2022	
4	BKIPM Balikpapan	BPPMHKP	2022	2023
5	BKIPM Banjarmasin	BPPMHKP	2021	
6	BKIPM Denpasar	BPPMHKP		2019 (WBK) Stranas; 2022 (WBBM)
7	BKIPM Entikong	BPPMHKP	2021	
8	BKIPM Jakarta II	BPPMHKP		2021
9	BKIPM Lampung	BPPMHKP	2023	
10	BKIPM Manado	BPPMHKP	2018	
11	BKIPM Mataram	BPPMHKP	2021	
12	BKIPM Medan I	BPPMHKP	2022	
13	BKIPM Medan II	BPPMHKP	2023	
14	BKIPM Merak	BPPMHKP	2023	
15	BKIPM Pangkalpinang	BPPMHKP	2023	
16	BKIPM Semarang	BPPMHKP		2014
17	BKIPM Surabaya I	BPPMHKP	2020	
18	BKIPM Surabaya II	BPPMHKP		2019 Stranas Kawasan
19	BKIPM Tarakan	BPPMHKP	2022	
20	BUSKIPM	BPPMHKP	2021	
21	SKIPM Batam	BPPMHKP	2022	
22	SKIPM Cirebon	BPPMHKP	2021	
23	SKIPM Pekanbaru	BPPMHKP	2021	
24	SKIPM Yogyakarta	BPPMHKP	2022	
1	SUPM Pontianak	BPPSDMKP	2017	
2	SUPM Waiheru	BPPSDMKP	2018	
3	Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan	BPPSDMKP	2017	
4	Balai Besar Riset Sosial Ekonomi KP	BPPSDMKP	2022	
5	Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Medan	BPPSDMKP	2021	
6	Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal	BPPSDMKP	2017	
7	Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Sukamandi	BPPSDMKP	2022	
8	Balai Riset Pemuliaan Ikan	BPPSDMKP	2021	
9	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan	BPPSDMKP	2017	
10	Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan	BPPSDMKP	2019	
11	BPPP Ambon	BPPSDMKP	2023	
12	BPPP Banyuwangi	BPPSDMKP	2018	2021
13	Politeknik AUP Jakarta	BPPSDMKP	2022	
14	Politeknik KP Pangandaran	BPPSDMKP	2023	
15	Politeknik KP Sidoarjo	BPPSDMKP	2023	
16	Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Bitung	BPPSDMKP	2024	
17	Politeknik Kelautan dan Perikanan Jembrana	BPPSDMKP	2024	
18	Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung	BPPSDMKP	2024	
19	Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang	BPPSDMKP	2024	
1	Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar Sukabumi	DJPB		2014
2	Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung	DJPB	2020	
3	Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Serang	DJPB	2021	
4	Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo	DJPB	2022	
5	Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Mandiangin	DJPB	2018	

No.	Unit Kerja	Unit Eselon I	Tahun Berpredikat WBK	Tahun WBK/WBBM MenPANRB
6	Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Sungai Gelam	DJPB	2022	
7	Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon	DJPB	2017	
8	Balai Perikanan Budidaya Laut Batam	DJPB	2019	
9	Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok	DJPB	2022	
10	Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Keekerangan Karangasem	DJPB	2020	
11	BPBAP Jepara	DJPB	2018	2021
12	BPBAP Takalar	DJPB	2023	
13	BPBAP Ujung Batee	DJPB	2023	
14	Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budi Daya Karawang	DJPB	2024	
15	Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Serang	DJPB	2024	
16	Balai Perikanan Budi Daya Air Tawar Tatelu	DJPB	2024	
1	Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan	DJPDS	2019	
2	Direktorat Logistik	DJPDS	2017	
3	Direktorat Pemasaran	DJPDS	2023	
4	Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu	DJPDS	2020	
5	Direktorat Usaha dan Investasi	DJPDS	2020	
1	BKKPN Kupang	DJPRL	2019	2022
2	BPSPL Denpasar	DJPRL	2018	
3	BPSPL Makassar	DJPRL	2017	
4	BPSPL Padang	DJPRL	2019	
5	BPSPL Pontianak	DJPRL	2017	2022
6	LKKPN Pekanbaru	DJPRL	2020	2022
7	LPSPL Sorong	DJPRL	2021	
8	LPSPL Serang	DJPRL	2020	
1	Pangkalan PSDKP Batam	DJPSPDKP	2020	
2	Pangkalan PSDKP Benoa	DJPSPDKP	2019	
3	Pangkalan PSDKP Bitung	DJPSPDKP	2018	
4	Pangkalan PSDKP Jakarta	DJPSPDKP	2019	
5	Pangkalan PSDKP Lampulo	DJPSPDKP	2021	
6	Pangkalan PSDKP Tual	DJPSPDKP	2020	
7	Stasiun PSDKP Ambon	DJPSPDKP	2023	
8	Stasiun PSDKP Belawan	DJPSPDKP	2021	
9	Stasiun PSDKP Biak	DJPSPDKP	2023	
10	Stasiun PSDKP Cilacap	DJPSPDKP	2021	
11	Stasiun PSDKP Kupang	DJPSPDKP	2022	
12	Stasiun PSDKP Pontianak	DJPSPDKP	2021	
13	Stasiun PSDKP Tahuna	DJPSPDKP	2022	
14	Stasiun PSDKP Tarakan	DJPSPDKP	2022	
15	Direktorat Pengendalian Operasi Armada	DJPSPDKP	2024	
1	Balai Besar Penangkapan Ikan	DJPT	2017	
2	Direktorat Perizinan dan Kenelayanan	DJPT		2016
3	PPN Brondong	DJPT	2019	
4	PPN Kejawan	DJPT	2020	
5	PPN Palabuhanratu	DJPT	2022	
6	PPN Pekalongan	DJPT	2020	
7	PPN Pemangkat	DJPT		2015
8	PPN Prigi	DJPT	2019	
9	PPN Sibolga	DJPT	2017	
10	PPN Sungailiat	DJPT	2019	
11	PPN Tanjung Pandan	DJPT	2023	
12	PPN Teluk Batang	DJPT	2023	

No.	Unit Kerja	Unit Eselon I	Tahun Berpredikat WBK	Tahun WBK/WBBM MenPANRB
13	PPS Bitung	DJPT	2020	
14	PPS Cilacap	DJPT	2021	
15	PPS Kendari	DJPT	2021	
16	Pelabuhan Perikanan Nusantara Kwandang	DJPT	2024	
17	Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate	DJPT	2024	
1	Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa	SETJEN	2022	
2	Pusat Data, Statistik, dan Informasi	SETJEN	2020	
3	Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	SETJEN	2019	
4	Biro Perencanaan	SETJEN	2024	
5	Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri	SETJEN	2024	
6	Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi	SETJEN	2024	



Lampiran 4. Hasil Evaluasi Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Bantuan Pemerintah Lingkup KKP Tahun 2023

JENIS BANTUAN	JUMLAH		SKOR			
	Bantuan	Dievaluasi	PT	IG	AT	TOTAL
<b>DJPT :</b>						
Alat Penangkapan Ikan (API)	119	102	78,24	7,45	5,78	<b>91,47</b>
Kapal	3	3	80	8,33	3,33	91,67
Mesin Kapal	104	91	75,38	8,38	6,26	90,03
<b>TOTAL DJPT</b>	<b>226</b>	<b>196</b>	<b>76,94**</b>	<b>7,90**</b>	<b>5,97**</b>	<b>90,80**</b>
<b>DJPB :</b>						
Mesin Pakan Ikan	3	2	57,5	10	2,5	<b>70</b>
Karamba Jaring Apung (KJA)	19	11	55,91	10	1,82	<b>67,73</b>
Kluster	6	6	80	10	6,67	<b>96,67</b>
Excavator	7	7	71,43	8,57	5,71	<b>85,71</b>
Pengelolaan Irigasi Tambak Partisipatif (PITAP)	4	4	80	8,75	7,5	<b>96,25</b>
Kincir	11	9	71,11	7,78	6,67	<b>85,56</b>
<b>TOTAL DJPB</b>	<b>50</b>	<b>39</b>	<b>68,46**</b>	<b>9,10**</b>	<b>5,00**</b>	<b>82,56**</b>
<b>DJPDSKP : Pasar Ikan</b>	2	2	77,5	8,75	10	<b>96,25</b>
Chest Freezer	29	27	78,89	7,5	5,93	<b>92,31</b>
Gudang Beku/Portabel	3	3	80	8,67	10	<b>98,67</b>
Kendaraan Berpendingin	5	5	78	9,8	10	<b>97,8</b>
Pabrik Es	3	3	65	7,5	3,33	<b>75,83</b>
<b>TOTAL DJPDS</b>	<b>42</b>	<b>40</b>	<b>77,75**</b>	<b>7,94**</b>	<b>6,75**</b>	<b>92,44**</b>
<b>DJPRL :</b>						
Bantuan Konservasi (KOMPAK)	2	1	80	10	10	<b>100</b>
Pengelolaan Sampah	1	1	80	10	10	<b>100</b>
Vegetasi Pantai	2	2	77,5	6,75	5	<b>89,25</b>
Wisata Bahari	3	3	73,33	8,17	10	<b>91,5</b>
<b>TOTAL DJPKRL</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>76,43**</b>	<b>8,29**</b>	<b>8,57**</b>	<b>93,29**</b>
<b>TOTAL KKP</b>	<b>326</b>	<b>282</b>	<b>75,87**</b>	<b>8,08**</b>	<b>6,01**</b>	<b>89,96**</b>

Keterangan:

\* Jumlah dimaksud adalah pada lokasi Uji Petik

\*\* Merupakan skor rata-rata gabungan jenis bantuan

## Lampiran 5. Rencana Rencana Aksi Pencapaian Target Kinerja Itjen KKP Tahun 2024

Anggaran: Rp86.789.911.000,00

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	NO	KEGIATAN PENDUKUNG	SATUAN	TW I		TW II		TW III		TW IV		JUMLAH 2024		%
						T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	
1	Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan KKP (%)	≤0,5	1	Reviu Laporan Keuangan	Kegiatan	9	9	0	0	0	0	0	0	9	9	100
			2	Reviu RKA-K/L (Penggangan)	Kegiatan	0	0	9	9	0	0	9	9	18	18	100
			3	Reviu Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan	Kegiatan	0	0	2	2	0	0	9	9	11	11	100
			4	Pengawasan Pengelolaan BMN	Kegiatan	16	16	0	0	4	4	11	11	31	31	100
			5	Pengawasan Penyerapan Anggaran	Kegiatan	10	10	6	6	8	8	8	8	32	32	100
			6	Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa	Kegiatan	39	39	5	5	11	11	16	16	71	71	100
			7	Pemantauan Pertanggungjawaban Keuangan	Kegiatan	29	29	5	5	4	4	5	5	43	43	100
			8	Pemantauan TL Hasil Pemeriksaan BPK RI	Kegiatan	5	5	8	8	8	8	11	11	32	32	100
			9	Pendampingan Pemeriksaan BPK RI	Kegiatan	10	10	0	0	0	0	0	0	10	10	100
2	Nilai Maturitas SPIP KKP (Nilai)	3,3	1	Pengawasan Manajemen Risiko Mitra	Kegiatan	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	100
			2	Pendampingan/Asistensi Implementasi SPI Mitra	Kegiatan	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	100
			3	Evaluasi Maturitas SPIP	Kegiatan	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	100
3	Unit Kerja KKP Berpredikat Menuju WBK (unit kerja)	106	1	Pendampingan/Asistensi Pembangunan Zona Integritas menuju WBK	Kegiatan	4	4	4	4	4	4	0	0	12	12	100
			2	Pemantauan/Evaluasi pembangunan Zona Integritas menuju WBK	Kegiatan	0	0	4	4	0	0	0	0	4	4	100
			3	Penilaian pembangunan Zona Integritas menuju WBK	Unit Kerja	0	0	0	0	12	12	0	0	12	13	108,33
4	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP KKP (Nilai)	84 (A)	1	Reviu Laporan Kinerja	Kegiatan	10	10	0	0	0	0	0	0	10	10	100
			2	Pendampingan/Asistensi SAKIP	Kegiatan	0	0	2	2	0	0	0	0	2	2	100
			3	Evaluasi SAKIP	Kegiatan	0	0	0	0	10	10	0	0	10	10	100
5	Nilai Survei Integritas KKP (nilai)	80,5	1	FGD metode Survey Integritas	Kegiatan	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	100
			2	Survei Integritas Unit Eselon I lingkup KKP	Kegiatan	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	100
6	Tingkat Efektifitas Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis Lingkup KKP (%)	82	1	Pendampingan pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis	Kegiatan	0	0	8	8	8	8	0	0	16	16	100
			2	Pemantauan/Evaluasi pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis	Kegiatan	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	100
7	Tingkat Efektifitas Pengawasan Pengelolaan BMN Lingkup KKP (%)	82	1	Pengawasan Pengelolaan BMN	Kegiatan	8	8	0	0	0	0	0	0	8	8	100
			2	Evaluasi/Penilaian Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN	Kegiatan	0	0	0	0	0	0	9	9	9	9	100
8	Tingkat Efektifitas Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup KKP (%)	82	1	Pengawasan PBJ	Kegiatan	4	4	4	4	0	0	0	0	8	8	100
			2	Evaluasi/Penilaian Tingkat Kepatuhan PBJ Mitra	Kegiatan	0	0	0	0	0	0	9	9	9	9	100
9	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup KKP (%)	80	1	Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan pada mitra	Kegiatan	9	9	9	9	9	9	9	9	36	36	100
10	Tingkat Kapabilitas Itjen KKP (Nilai)	3,5	1	Penetapan Tim Penguatan Kapabilitas Itjen	Dokumen	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	100
			2	Rapat Koordinasi Penguatan Kapabilitas Itjen	Kegiatan	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	100
			3	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Kegiatan	6	6	6	6	6	6	6	6	24	24	100
			4	Pengembangan Sistem Informasi Itjen	Aplikasi	1	1	1	1	1	1	1	1	4	4	100
11	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Itjen KKP (indeks)	85	1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Kegiatan	6	6	6	6	6	6	6	6	24	24	100
			2	Monev Presensi Pegawai Itjen	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	4	3	100
			3	Monev SKP Pegawai	Kegiatan	3	3	3	3	3	3	3	3	12	9	100
12	Unit Kerja Itjen yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)	94	1	Pelaporan Kinerja Tahun 2024	Kegiatan	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	100
			2	Perencanaan Kinerja Tahun 2024 lingkup Itjen	Kegiatan	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	100
			3	Pemantauan tingkat pemenuhan partisipasi pada Sistem Manajemen Pengetahuan Lingkup Itjen KKP ( <i>Portal Collaboration Office</i> )	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	4	4	100

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	NO	KEGIATAN PENDUKUNG	SATUAN	TW I		TW II		TW III		TW IV		JUMLAH 2024		%
						T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	
13	Persentase Implementasi Sistem Informasi Pengawasan Lingkup Itjen KKP (%)	88	1	Evaluasi Implementasi Sistem Informasi Lingkup Itjen KKP	Kegiatan	1	1	0	0	1	1	0	0	2	2	100
			2	Perencanaan Implementasi Sistem Informasi Lingkup Itjen KKP	Kegiatan	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	100
			3	Pengembangan Sistem Informasi Itjen	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	4	4	100
			4	Pemantauan implementasi Sistem Informasi Itjen	Kegiatan	0	0	1	1	1	1	1	1	4	4	100
14	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Itjen KKP (Nilai)	93,76	1	Manajemen risiko lingkup Itjen	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	4	4	100
			2	Pemantauan realisasi pelaksanaan kegiatan/ anggaran Itjen	Kegiatan	3	3	3	3	3	3	3	33	12	12	100
			3	Pemantauan dan Pelaporan pelaksanaan PBJ Itjen	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	4	4	100
15	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Itjen KKP (Nilai)	86	1	Pemantauan realisasi pelaksanaan kegiatan/ anggaran Itjen	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	4	4	100
			2	Monev Capaian Kinerja Itjen	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	4	4	100
16	Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Lingkup KKP (rekomendasi)	18	1	Kajian/Evaluasi/Riviu Kebijakan lingkup mitra	Kegiatan	0	0	9	12	0	0	9	9	18	21	66,67
17	Persentase Pelaksanaan Penugasan dan Pelaporan Pengawasan yang Memenuhi Standard Mutu Pengawasan Lingkup Itjen KKP (%)	89	1	Monitoring Implementasi Kendali Mutu Pengawasan	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	4	4	100
			2	Evaluasi Pengendalian Mutu Pengawasan	Kegiatan	0	0	1	1	0	0	1	1	2	2	100
18	Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaksanaan PKPT Lingkup Itjen KKP (%)	80	1	Monitoring Pelaksanaan PKPT lingkup Inspektorat	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	4	4	100
			2	Evaluasi Pelaksanaan PKPT lingkup Inspektorat	Kegiatan	0	0	1	1	0	0	1	1	2	2	100
19	Indeks Persepsi Pegawai KKP Terhadap Kinerja Pengawasan Itjen (indeks)	4,16	1	Penandatanganan Pakta Integritas Itjen	Kegiatan	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	100
			2	Publikasi informasi dan kinerja pengawasan intern KKP	Kegiatan	2	2	2	2	2	2	2	2	8	8	100
			3	Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pengawasan Itjen	Kegiatan	6	6	6	6	6	6	6	6	24	24	100
			4	Survei Persepsi Pegawai atas Kinerja Itjen	Kegiatan	8	9	8	9	8	23	8	14	24	55	170,83

Lampiran 6. Rincian Rekomendasi perbaikan kebijakan lingkup KKP s.d Semester II Tahun 2024

No	Uraian	Unit Kerja
1.	Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri di Lingkungan KKP	Inspektorat I
2.	Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Atas Kepmen-KP Nomor 5 Tahun 2024	Inspektorat I
3.	Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Tata Kelola Perizinan pada Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Inspektorat I
4.	Penyempurnaan Pedoman Teknis Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan KKPR	Inspektorat I
5.	Telaahan dan Masukan atas Standar Operasional Prosedur Penerbitan Pembatalan SLO dan SKP SLO serta Petunjuk Teknis Pengawasan Kapal Perikanan	Inspektorat II
6.	Telaahan dan Masukan atas Perhitungan Total Nilai Investasi Terkait Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut pada Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan, Ditjen PSDKP	Inspektorat II
7.	Hasil Evaluasi Kegiatan Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan pada Stasiun PSDKP Biak	Inspektorat II
8.	Masukan terhadap Perbaikan Pelaksanaan Pasca Produksi Tahun 2024	Inspektorat II
9.	Masukan Terhadap Rancangan Petunjuk Teknis tentang Bantuan Pemerintah di Lingkup Direktorat Perbenihan Tahun 2024	Inspektorat III
10.	Masukan Terhadap Rancangan Peraturan/Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya tentang Pedoman Umum Pembudidayaan Lobster	Inspektorat III
11.	Masukan Rancangan Peraturan Menteri KP tentang Pelatihan Masyarakat di Lingkungan KKP	Inspektorat III
12.	Kajian atas Tambahan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan BLU Bersumber dari Rupiah Murni	Inspektorat III
13.	Masukan atas Rancangan Peraturan Menteri KP tentang Pengendalian Resistansi Antimikroba pada Perikanan Budidaya	Inspektorat III
14.	Saran/Masukan Atas Rencana Kegiatan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Inspektorat III
15.	Saran Masukan Atas Rancangan Keputusan Dirjen PDSPKP tentang Pedoman Nilai Tukar Pengolahan Hasil Perikanan	Inspektorat IV
16.	Saran Masukan atas Rancangan Revisi Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 68 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Inkubasi Bisnis Inovasi Produk Kelautan dan Perikanan	Inspektorat IV
17.	Saran Masukan atas Optimalisasi Capaian Indikator Keberhasilan Reformasi Birokrasi Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025	Inspektorat IV
18.	Saran Masukan atas Modeling Sertifikasi Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB Kapal)	Inspektorat IV
19.	Masukan/Tanggapan atas Draft Keputusan Inspektur Jenderal Tahun 2024 tentang Pedoman Pemberian Reward Dan Punishment (Penghargaan Dan Sanksi) Bagi Petugas Pelayanan Publik pada Inspektorat Jenderal KKP	Inspektorat V
20.	Masukan/Tanggapan Atas Rancangan Peraturan Menteri KP Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri KP Nomor 17/PERMEN-KP/2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024	Inspektorat V
21.	Rekomendasi Kebijakan <i>Big Data Analytics</i>	Inspektorat V

Lampiran 7. Survei Indeks Persepsi Pegawai KKP terhadap Kinerja Itjen KKP Tahun 2024

No	Nama Satker	Jumlah Responden	Nilai Skala Likert
1.	BPPMHKHP Pangkal Pinang	13	4,60
2.	PPN Sungailiat	15	4,27
3.	BRPPUPP Palembang	15	4,34
4.	Stasiun KIPM Palembang	16	4,56
5.	BPSPL Padang	15	4,30
6.	Stasiun KIPM Padang	7	4,16
7.	Politeknik AUP Pasar Minggu	16	4,39
8.	PPS Cilacap	15	4,35
9.	Stasiun PSDKP Cilacap	15	4,40
10.	BBPPPKP Cilangkap	14	4,22
11.	BKIPMKHP Semarang	14	4,20
12.	BBPBAP Jepara	15	4,41
13.	BKIPMKHP Surabaya II	16	4,55
14.	PPN Brondong	15	4,56
15.	Biro Keuangan dan BMN	12	4,35
16.	Sekretariat Ditjen PT	15	4,20
17.	Direktorat PDK DJPT	10	4,28
18.	Sekretariat Ditjen PB Pusat PM BPPMHKHP	15	4,32
19.	Sekretariat Ditjen PB	11	4,23
20.	Direktorat KKI DJPB	15	4,20
21.	Direktorat Logistik, DJPDSPKP	11	4,37
22.	Biro Hukum Setjen	14	4,30
23.	Biro SDMAO Setjen	15	4,29
24.	Sekretariat Ditjen PSDKP	15	4,19
25.	Sekretariat Ditjen PDSPKP	15	4,41
26.	Sekretariat BPPSDMKP	15	4,23
27.	BHKLN Setjen	15	4,33
28.	Pusdatin	13	4,60
29.	Biro Umum dan PBJ	15	4,38
30.	Sekretariat Ditjen PKRL	15	4,20
31.	Direktorat PRL	15	4,44
32.	Biro Perencanaan Setjen	15	4,44
33.	BPPP Tegal	15	4,33
34.	SUPM Tegal	15	4,47
35.	BPKIL Serang	9	4,21
36.	LPSPL Serang	15	4,48
37.	Stasiun KIPM Yogyakarta	15	4,35
38.	LRMPHP Bantul Yogyakarta	16	4,16
39.	BKIPMKHP Surabaya I	15	4,45
40.	PPN Prigi Surabaya	15	4,67
41.	PPN Karangantu Banten	15	4,23
42.	BPI SDKP Jembrana	13	4,40
43.	Politeknik KP Jembrana	16	4,19
44.	BPBDL Lombok	15	4,41
45.	BKIPM Mataram	15	4,79
46.	Politeknik KP Bitung	16	4,34
47.	PPSDKP Bitung	15	4,79
48.	BPSPL Pekanbaru	16	4,61
49.	SKIPMKHP Pekanbaru	16	4,47
50.	BRBIH Depok	15	4,21
51.	BDA Sukamandi	15	4,73
52.	BRPSDI Jatiluhur	15	4,40
53.	Poltek AUP Cikaret	14	4,11
54.	PPS Nizam Zachman	15	4,50
55.	BRBPBAT Sempur	15	4,32
	<b>Jumlah / Rata-Rata</b>	<b>793</b>	<b>4,37</b>